

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di daerah merupakan salah satu bentuk implementasi dari pada tujuan pembangunan Nasional yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuat daerah berlomba-lomba membangun dan menata sistem pembangunan di daerah, karena pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Arah dan kebijakan pembangunan di daerah mengacu pada tujuan Pembangunan Nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terhimpun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat, sehingga terwujud suasana prikehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram dan dinamis. Maka pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari keikut sertaan masyarakat dalam pembangunana itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan di daerah mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Pada paradigma pemberdayaan masyarakat tidak hanya di

pandang sebagai objek pembangunan tetapi lebih menitikberatkan pada masyarakat untuk pembangunan. ( *Hidayat, 2001 : 3* )

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan tidak hanya di pandang dari tersedianya aset daerah tetapi juga dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah . Sumber daya alam yang cukup potensial jika diimbangi dengan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas, akan memberikan dampak yang positif dan berarti bagi pembangunan daerah.

Hakekat pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan. Yang mana selama ini di pandang pelaksanaan pembangunan tidak merata sehingga masih banyak daerah yang tertinggal, untuk itu pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan lebih mengarah pada corak peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah disamping pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya kegiatan, yang mengarah pada pola pengembangan pembangunan masyarakat.

Pembangunan di daerah juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka untuk terlaksananya pembangunan tersebut perlu dilakukan pembinaan yang khusus dari pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait baik secara rutin maupun berkala. Sasaran pembinaan dapat dilakukan baik dalam bentuk kelompok usaha atau perorangan, dengan tujuan apa yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung pada peran masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri yang saling menunjang, mengisi, dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Untuk tercapainya tujuan tersebut telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama pembangunan yang telah dilaksanakan, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuhkan kembangkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan koperasi.

Usaha kecil yang merupakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi khususnya. Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian di daerah. Hal itu disebabkan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Hambatan di sektor internal lebih mengarah pada sumber daya manusia dan Teknologi, sedangkan disektor eksternal mengarah pada bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Supaya pengembangan usaha kecil lebih mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah sebagai pedoman

pembentukan instansi/dinas terkait untuk melakukan pembinaan kelompok Usaha Kecil Menengah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah ( PP ) yang ada.

Untuk meningkatkan kelompok Usaha Kecil Menengah, tidak hanya memperhatikan besaran jumlah dana yang disalurkan ke kelompok, tetapi juga fungsi pembinaan dari pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan kelompok. Untuk terwujudnya pemerataan pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan berbagai program percepatan pembangunan masyarakat perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa penyediaan dana bantuan modal usaha.

Fungsi pembinaan bertujuan supaya kelompok usaha dan dana yang disalurkan, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih berarti untuk masa sekarang maupun akan datang, sehingga angka kemiskinan menurun dan angka kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi kelompok usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peranannya dalam kontribusi produk nasional. Disamping itu juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekspor, dan peningkatan pendapatan ekonomi bagi dirinya.

Kabupaten Karimun merupakan daerah yang cukup strategis, memiliki sumber daya alam yang memadai, sehingga menjadi peluang bagi pembangunan ke depan. Namun berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BKKBN

tahun 2001 keluarga miskin yang ada di Kabupaten Karimun berjumlah 874.423 atau ( 42,25% ).

Dengan tingginya jumlah kemiskinan masyarakat maka pemerintah Kabupaten Karimun menyelenggarakan program-program pengentasan kemiskinan, sekaligus menjadikan program prioritas di daerah berupa program yang bersifat pemberian bantuan dana kepada Usaha Kecil Menengah. Adapun sasaran program tersebut lebih mengarah pada kelompok baik perorangan, yang dibentuk oleh kecamatan maupun dinas/instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Hal tersebut Sejalan dengan 4 ( empat ) Pilar Pembangunan Kabupaten Karimun yaitu Pengembangan Ekonomi yang berdimensi kerakyatan, Azam Peningkatan Sumber Daya Manusia, Azam Peningkatan Iman dan Taqwa dan Azam Pengembangan Seni dan Budaya. Bertitik tolak dari pilar pembangunan yang berdimensi kerakyatan, maka pemerintah Kabupaten Karimun melalui sumber dana APBD mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan.

Pembentukan kelompok UKM di Kabupaten Karimun sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Karimun, dilihat dari jumlah kelompok usaha kecil cukup banyak, namun dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan kelompok masih belum berkembang dengan pesat, justru pengembalian pinjaman dana UKM masih banyak mengalami kemacetan.

Melihat gejala dan permasalahan yang muncul pemerintah daerah Kabupaten Karimun berupaya membentuk Forum Komunikasi Penyelenggara

Pinjaman Modal (FKPPM) yang keanggotaannya terdiri dari, Kepala Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai Tim Teknis dan Camat sebagai Tim pemberi rekomendasi yang ditujukan kepada dinas.

Sejalan dengan pembentukan Forum Komunikasi Penyelenggara Pinjaman Modal (FKPPM), Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No.62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Teknis yang berfungsi sebagai tenaga pembina terhadap kelompok Usaha Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Karimun, juga mempunyai peranan penting sebagai pemberi rekomendasi pada saat peminjaman dana terhadap pengelolaan usaha dan pembinaan kepada pengelola usaha pemakai dana UKM. Namun dalam pelaksanaan Tim Teknis Kabupaten kurang mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing pengelola usaha baik perorangan maupun berkelompok, sehingga terjadinya kemacetan dalam pengembalian pinjaman UKM.

Dengan memperhatikan data dan fakta yang ada di lapangan, maka diduga kemacetan tersebut disebabkan kurangnya pembinaan ataupun bimbingan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dari masing-masing dinas/badan terhadap Pengelola Usaha yang ada di Kecamatan Tebing. Tim teknis Kabupaten di bentuk dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan, membina pengembangan usaha dan mengkoordinir sistem pengembalian pinjaman dana kelompok UKM.

Adapun pembinaan atau bimbingan yang dilakukan Tim Teknis Kabupaten dalam hal ini mencakup, melatih, memberikan kecakap teknis, memberikan petunjuk, dan mengarahkan ( *Makmur, 2008 : 102*). Hal ini menunjukkan bahwa agar sistem manajemen UKM berjalan dengan baik sesuai tuntutan pemerintah, yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga apabila dikelola dengan baik dengan sistem manajemen yang terpola, maka akan mampu mengatasi kemacetan pengembalian pinjaman dana UKM bagi pengelola usaha kelompok maupun perorangan.

Di samping itu juga faktor penyebab terjadinya kemacetan tersebut diduga tidak adanya pembinaan atau bimbingan dari dinas atau instansi terkait, juga pengelola usaha kelompok baik perorangan kurang tepat melakukan penyusunan perencanaan usaha terhadap pengembangan kelompok UKM di Kabupaten Karimun . Sehingga banyaknya terjadinya kegagalan dalam usaha yang mengakibatkan terjadinya penunggakan yang cukup tinggi.

Fenomena inilah yang menarik perhatian untuk mengadakan penelitian dengan judul : Pembinaan Tim Teknis Kabupaten dalam meningkatkan Kemampuan Pengelola Usaha Pengembalian Pinjaman UKM di Kecamatan Tebing.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Pembentukan usaha kelompok dalam wadah Usaha Kecil Menengah, yang diiringi dengan bantuan dana usaha diharapkan mampu meningkatkan

ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, tetapi secara riil perubahan tersebut belum memberikan dampak terhadap perubahan.

Sistem penyaluran dana UKM jelas disalurkan kepada usaha kelompok, namun yang terlihat sekarang ini pertumbuhan kelompok dan individu meningkat, tetapi dana yang dipinjam tidak kelihatan pengembaliannya ( macet ). Kemacetan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Menurut asumsi adapun penyebab terjadinya kemacetan tersebut disebabkan kurangnya pembinaan dari Dinas/Instansi terkait yang merupakan sebagai tim teknis, sehingga secara empirik menimbulkan kesenjangan pada sistem pengembalian dana pinjaman usaha kecil dan menengah baik dibidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan dan Perindustrian serta dibidang Koperasi.

Hal ini menunjukkan bahwa dari 175 Usaha Kecil Menengah yang ada di Kecamatan Tebing, terdiri dari 9 kelompok yang dikelola secara Kelompok dan 166 dikelola secara perorangan, disamping itu dari 175 kelompok dan perorangan yang memperoleh dana bantuan UKM hanya 26 ( 14,8 ) % usaha kecil menengah yang tidak mengalami tunggakan. Dengan demikian sebagian besar ( 85,2% ) usaha kecil menengah tidak dapat mengembalikan pinjaman. Adapun besarnya masing-masing kelompok yang menggunakan dana pinjaman UKM dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 1. Nama kelompok dan besarnya dana pinjaman dana UKM untuk masing-masing usaha kelompok.

NO	NAMA	JUMLAH PINJAMAN	ALAMAT
1	Panca Lestari	40.000.000,-	Pamak
2	Panca Rajawali	40.000.000,-	Pamak
3	Prasetia Karya	40.000.000,-	Pamak
4	Paten Jaya	40.000.000,-	Pongkar
5	Bangunsari	20.000.000,-	Bangunsari
6	Kawan Sejalan	35.000.000,-	Alorjongkong
7	Bosmijaya Nazihir	50.000.000,-	TL.Uma
8	Nasrun Klp pancing	25.000.000,-	TL.Uma
9	Ar-raudah	35.000.000,-	TL.Uma

Sumber : Kantor Camat Tebing, Tahun 2006.

Fenomena dan realitas tersebut menjadi pernyataan masalah (*Problem Statement*) penelitian ini, sehingga kedepan diharapkan pengelolaan baik untuk usaha kelompok dan perorangan dapat berjalan dengan baik, dan dana pinjaman UKM dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kemacetat.

Berdasarkan gejala yang muncul dari identifikasi masalah penelitian, maka penelitian ini dapat dirumuskan kedalam (*Problem Question*) dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai tim teknis tingkat Kabupaten Karimun terhadap pengelola usaha pengguna dana UKM ?
2. Bagaimanakah pengelolaan usaha kelompok pengguna dana UKM ?
3. Seberapa besar tingkatan kemampuan pegelola usaha pengembalian pinjaman UKM ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai tim teknis tingkat Kabupaten Karimun terhadap pengelola usaha pengguna dana UKM.
2. Untuk mengetahui pengelolaan usaha kelompok pengguna dana UKM.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan pengelolaan usaha dalam pengembalian pinjaman UKM .

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini nantinya akan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Akademik : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi atau sebagai media untuk pengembangan kelompok dan individu pengelola dana UKM yang ada di Kecamatan Tebing khususnya dan Kabupaten Karimun umumnya, juga dapat ini dijadikan sebagai pengembangan konsep/teori dalam manajemen khususnya dibidang pengelolaan dana UKM.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan *alternatif* pemikiran dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam memecahkan masalah pelaksanaan pengelolaan UKM di Kabupaten Karimun disamping itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KAJIAN TEORI**

Pelaksanaan program Usaha Kecil Menengah ( UKM ) di Kabupaten Karimun, didasari dari arah dan kebijakan pemerintah membentuk daerah otonomi. Tujuan pembangunan dalam kebijakan otonomi daerah saat ini yaitu mempercepat pembangunan yang dilaksanakan didaerah, karena mengingat tidak sedikit pula masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah (Widjaja; 2001 : 6 ).

Pembentukan daerah otonomi tidak hanya ditinjau dari sudut politis semata-mata, tetapi mampu merubah tantangan, harapan dan peluang masa depan yang lebih baik, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas, menumbuhkan sistem perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, merubah pola kehidupan masyarakat yang lebih kondusif serta terbentuknya sistem informasi global.

Otonomi daerah yang dilaksanakan sekarang ini bertujuan supaya daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi terhadap sumber-sumber pendapatan. Penetapan sistem belanja daerah bertujuan agar lebih ekonomi, efisien, efektif dan mengidentifikasi kemampuan perangkat daerah,

meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun kepada publik/masyarakat. Pembangunan otonomi daerah tidak hanya lebih mengarahkan pada pembangunan yang lebih bersifat fisik, tetapi diharapkan pemerintah daerah mampu memperhatikan pembangunan non fisik yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Selama ini yang dirasakan oleh masyarakat kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah, sehingga dengan otonomi daerah ini perhatian terhadap masyarakat lebih meningkat dan teratasi secara maksimal, tertib dan efisien. Arah pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah, tidak terlepas dari cara pandang daerah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan 4 ( empat ) pilar penggerak Pembangunan di Kabupaten Karimun pada era otonomi daerah ini yaitu Pengembangan Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan, Peningkatan sumber daya manusia, peningkatan Iman dan Taqwa dan Pengembangan Seni dan Budaya.

Untuk mempercepat pencapaian pilar pembangunan yang berdimensi pengembangan ekonomi kerakyatan, penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengembangan kelompok usaha kecil menengah disektor perikanan darat. Supaya pada sektor tersebut berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Karimun khususnya di sektor perikanan darat tersebut, perlu dilakukan pembinaan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun.

Salah satu upaya untuk terwujudnya pilar pembangunan dibidang Pengembangan ekonomi yang berdimensi kerakyatan di Kabupaten Karimun, melalui pembangunan yang berwawasan ekonomi produktif. Pengembangan kelompok usaha kecil menengah bertujuan untuk membantu mempercepat perkembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Karimun.

### **1. Pembinaan Tim Teknis**

Supaya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pengelola kelompok Usaha Kecil Menengah di sektor perikanan darat berhasil sesuai diharapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Keputusan Bupati Nomor 45 Tahun 2004 ( pasal 9 ayat 1 ) menetapkan tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai berikut : melaksanakan dan penyusunan petunjuk teknis operasional perencanaan, pelaporan, budidaya dan bina usaha perikanan darat, sedangkan fungsinya , yaitu :

- a. Merencanakan budidaya perikanan darat;
- b. Merumuskan pelaporan budidaya ikan darat;
- c. Merumuskan dan melaksanakan petunjuk teknis operasional budidaya perikanan darat;
- d. Merumuskan dan pembinaan usaha perikanan darat ;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha ikan darat;
- f. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas,

Di samping itu program UKM yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 32 tahun 1998 ( : 1- 2 ) Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Adapun ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi (pasal : 4). Pembinaan dan Pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil,
- b. Menyiapkan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi usaha kecil,
- c. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan,
- d. Melakukan Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pembinaan bagi usaha kecil.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan;

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- b. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;

- c. Memberikan kemudahan dalam pngaadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- d. Menyediakan tenaga konsultan profesionaldi bidang produksi dan pengolahan ( *PP. 32 : 5- 6* ).

Untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan;

- a. Melaksanakan penelitian dan mengkaji pemasaran;
- b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. Memasarkan produk.

Bahwa pembinaan merupakan suatu bentuk pendidikan, dalam arti bahwa antara pembina dan yang dibina terdapat kesamaan tujuan. Bukan berarti pembinaan memaksa sesuatu kepada yang dibinanya, kesamaan ini berarti kesamaan hakekat diantara pembina, bahwa yang dibina mempunyai kualitas rohaniah yang sama dengan pembina. (*Tilaar : 1990 , 373* ).

Menurut Rubin ( 1993 ) dalam Konsep *Community Based Development* ( *CBD* ), bahwa fenomena yang muncul dan dilaksanakan oleh Pemerintah dilatar belakangi, karena adanya prinsip-prinsip dasar, yaitu :

1. Untuk mempertahankan eksistensinya dengan memerlukan *break even* dalam setiap kegiatan yang dikelola,
2. Selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program yang dilakukan,

3. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,
4. Harus dapat memaksimalkan sumber daya ( *Resources* ) khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya,
5. Lebih memfungsikan diri sebagai katalis yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah bersifat makro, dan kepentingan masyarakat bersifat mikro.

Di samping itu juga dalam melakukan pemilihan/identifikasi Unit Usaha Prospektif ( UUP ) pada program pemberdayaan ekonomi rakyat, memerlukan keahlian profesional khusus. Secara umum dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi jenis-jenis usaha dilokasi program pemberdayaan ekonomi rakyat,
2. Daftar jenis usaha diinformasikan kepada pihak-pihak berkompeten, seperti : Kepala Desa dan staf,
3. Memewancarai beberapa nara sumber yang mewakili tiap jenis usaha yang telah didaftar, ditambah dengan nara sumber yang mewakili asosiasi, koperasi dan semua kepala dusun/ RW,
4. Melakukan observasi lapangan untuk melihat lebih dekat beberapa jenis usaha yang diinformasikan tentang keberadaannya relatif yang meragukannya,

5. Menjumlah atau mencari nilai rata-rata dari setiap jenis usaha dan seterusnya menyusun daftar jenis usaha . ( *Hidayat, 2001 : 35* )

Selanjutnya adapun upaya yang dilakukan untuk menetapkan kriteria dari calon binaan yang terhimpun didalam kelompok dengan tujuan agar supaya rekrutmen binaan dapat lebih efektif, maka dilakukan seleksi sebagai berikut :

1. Mengunjungi kantor camat dan kantor lurah di lokasi pelaksanaan program. Tujuan kegiatan ini adalah selain untuk melakukan konsultasi dengan perangkat pemerintah setempat, juga dimaksudkan untuk mendapatkan informasi lebih spesifik tentang konsentrasi target binaan tingkat RW dan RT.
2. Melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal para calon binaan yang terpilih . Tujuan dari kegiatan ini antara lain, untuk meyakinkan bahwa para calon binaan yang akan diseleksi benar, benar termasuk pada katagori yang ditetapkan.
3. Mewawancarai calon binaan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengetahui kesungguhan para calon binaan berpartisipasi dalam program yang akan di kembangkan. ( *Hidayat, 2001 : 43* )

Secara khusus manajemen pemberdayaan masyarakat lebih memfokus pada strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melalui pendekatan sebagai berikut :

1. Harus melibatkan warga masyarakat setempat secara kolektif dalam organisasi masyarakat setempat secara proaktif,

2. Harus mempermudah akses warga masyarakat setempat pada sumber pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan,
3. Harus secara kognitif menyadarkan warga masyarakat bahwa proses penanggulangan kemiskinan harus dilakukan sendiri oleh mereka secara demokratis demi memperkuat modal sosial dan membina nilai-nilai interval yang meliputi kejujuran, kemanusiaan, kebersamaan, gotong-royong, keadilan sosial dan sejenisnya.
4. Harus melibatkan jajaran aparat negara mulai dari yang paling dekat dengan lingkungan warga masyarakat sampai kabupaten/kota dan propinsi,
5. Pendekatan pemberdayaan harus dipahami sebagai strategi, bukan tujuan (*Wrihatnolo, 2002 : 25*).

Menurut Siswanto (2007 :111) secara umum pengarahan dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengarahan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan pada kelompok maupun individu pengelola usaha. Pelaksanaan pengarahan dengan menekankan pada keluaran yang menghasilkan sekaligus mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap sistem perusahaan maupun dalam organisasi adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Kontinuitas Perencanaan.

Suatu perencanaan ditetapkan untuk dijadikan pedoman normatif dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan kerja yang baik akan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pengarahan dilakukan untuk menjamin kelangsungan perencanaan yang telah ditetapkan meskipun bersifat fleksibel namun prinsip yang terkandung didalamnya harus tetap terjamin kontinuitasnya.

2. Membudayakan Prosedur Standar.

Suatu prosedur akan memberikan seperangkat atau petunjuk detail untuk melaksanakan urutan –urutan tindakan yang sering atau biasa terjadi. Dengan adanya pengarahan diharapkan prosedur kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Menghindari Kemangkiran Yang Tak Berarti.

Suatu kemangkiran akan sedikit berarti apabila karyawan yang tidak masuk kerja tersebut selama tidak adaannya ikut mengerjakan pekerjaan kantor di luar atau ikut memecahkan persoalan yang dihadapi organisasinya.

4. Membina Disiplin Kerja

Tujuan lain perlunya penerapan fungsi pengarahan adalah agar terbinanya disiplin kerja dilingkungan organisasi. Disiplin dapat diartikan sebagai suatu sikap mental yang menyatu dalam kehidupan yang mengandung pemahaman terhadap norma, nilai dan peraturan dalam melaksanakan hak dan kewajiban kehidupan (Wiraputra , 1987 ). Disiplin kerja menyangkut esensi dari eksistensinya sebagai karyawan, pada dasarnya harus mempertanyakan tugas rutinya dan bagaimana melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Disiplin kerja yang terbina akan memberikan dampak positif

terhadap perusahaan yaitu naiknya produktivitas kerja, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya ( Siswanto, 1987 ).

5. Membina Motivasi yang Terarah

Penerapan fungsi pengarahan juga memiliki tujuan untuk membina motivasi kerja para karyawan yang terarah. Maksudnya karyawan melaksanakan pekerjaan sambil dibimbing dan diarah untuk menghindari kesalahan prosedur yang berdampak terhadap keluarannya ( Siswanto, 12 ).

Hadari dan Martini (1994:83) mengatakan bimbingan atau pengarahan dapat diwujudkan sebagai berikut :

1. Memberikan dan menjelaskan perintah, agar jelas apa yang harus dikerjakan.
2. Memberikan petunjuk pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok.
3. Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan/ kecakapan dan keahlian yang berhubungan dengan kerja organisasi, melalui tugas/ izin belajar, kursus, penataran dan lain-lain.
4. Memberikan kesempatan ikut serta memajukan dan mengembangkan unit / satuan kerja dan bahkan seluruh organisasi melalui penyaluran inisiatif dan kreativitas masing-masing.
5. Memberikan koreksi pada personel yang keliru dalam melaksanakan tugas pokoknya, serta membantu memperbaikinya.
6. Memutasikan personel pada bidang kerja yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, bagi yang ternyata kurang berprestasi dalam bidang yang sedang ditekuninya.

Secara umum menurut Robinson dalam Syamsulbahri (2001:44) mendefinisikan pelatihan sebagai suatu instruksi atau proses pendidikan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya menurut Maslow dalam Syamsulbahri (2001:45) dalam teorinya yang dikenal sebagai *need of hierarhcy* mengemukakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu sangat dibutuhkan tidak saja untuk membekali yang bersangkutan dalam memulai atau mengembangkan aktivitas tertentu, tetapi juga guna untuk mencapai kepuasan atas hasil kerja yang dilakukan. Kepuasan atas hasil kerja menjadi sangat penting, karena hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang.

Menurut Herzbrerg dalam syamsulbahri (2001:45) peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui pelatihansangat diperlukan tidak saja untuk meningkatkan produktivitas kerja juga untuk mengurangi rasa tidak puas atau lingkungan kerja. Kinerja suatu organisasi maupun kelompok dapat disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan kesalahan dalam bimbingan dapat berdampak kepada sikap dan perilaku kelompok dan kurang kooperatif dalam melaksanakan kegiatan. Untuk itu pembimbingan sangat penting karena mencakup hal-hal seperti melatih, memberi kecakapan teknis, memberikan petunjuk dan mengarahkan ( Makmur, 2007 : 102 ).

Di samping itu menurut Stewart (1998 : 92) bahwa membimbing adalah bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi staf dan rekan-rekan sekerja. Membimbing lebih luas dari pada pendelegasian. Membimbing sangat

fundamental bagi pemberdayaan. Dengan demikian bimbingan terhadap kelompok maupun perorangan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan menyusun kegiatan-kegiatan tugas dan fungsi dinas. Selama ini pengelola usaha kelompok maupun perorangan kurang mendapat bimbingan atau pembinaan dalam pengembangan usaha.

Namun tak kalah penting adanya minat dan kemauan dari pada pengelola kelompok dan individu untuk tetap mengembang usaha yang dikelolanya, dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk upaya mencapai tujuan. Untuk itu pemerintah daerah melalui tim teknis melaksanakan pembinaan atau bimbingan, pelatihan bagi pengelola kelompok dan individu pemakai dana UKM yang ada. Beberapa konsep teoritis yang dapat menjelaskan fakta-fakta di atas sebagaimana dikemukakan Stewart (1998 : 92) membimbing adalah bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi staf dan rekan-rekan sekerja. Membimbing sangat fundamental bagi pemberdayaan”

Pemberdayaan pengelolaan usaha kelompok ataupun individu, peran yang terpenting tentu saja adalah manajer. Jika anggota kelompok dan individu dalam pengelolaan usaha tidak melihat pemerintah tanggap dalam mengambil resiko dan tidak memperlihatkan peran dalam pengembangan kelompok maupun individu, jangan harap mereka mau berbuat kearah yang lebih baik. Dalam konteks ini, Stewart (1998 : 93) selanjutnya mengemukakan sebagai berikut : melatih (*coaching*) merupakan bagian yang hakiki dari membimbing. Kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki staf sangat perlu diketahui, sehingga dapat dijadikan contoh bagi staf lainnya.

Penjelasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa pengetahuan bukanlah kekuasaan, tetapi merupakan bahan bakar bagi pemberdayaan. Kita perlu berusaha agar kecakapan-kecakapan dan pengetahuan kita dapat dimanfaatkan oleh lingkungan yang lebih luas. Demikian pula memberikan petunjuk dan melatih para staf atau karyawan merupakan bentuk bimbingan yang sangat efektif.

Stewart sebagaimana dikemukakan hanya mengemukakan bahwa membimbing adalah bertindak sebagai teladan dan pelatih, tanpa secara tajam menyebutkan bahwa setiap pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan benar dalam bersikap, bertutur dan bertindak sehingga staf atau bawahan dapat mengambil contoh dan teladan. Melatih atau memberikan latihan (*training*) menurut Atmosoeparto (2002 : 49) bahwa pelatihan adalah kegiatan belajar yang berhubungan dengan tugas saat ini (*learning related to present job*), sedangkan menurut Hasibuan (2001 : 76) bahwa : Latihan / training diberikan kepada karyawan operasional. Latihan harus berdasarkan kebutuhan pekerjaan, yang tergantung kepada beberapa faktor yaitu : waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang dan lain-lain.

Menurut Dessler (1997: 263) dalam konteks ini mengemukakan sebagai berikut : Pelatihan merupakan proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Dengan demikian, pelatihan berarti menunjuk seorang untuk dapat mempraktikkan suatu keterampilan yang diperoleh dari pelatihan. Sementara itu pelatihan berfokus kepada keterampilan yang dibutuhkan pada saat ini.

## 2. Pengelola Usaha

Pengelola usaha dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan karena mereka adalah yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide, dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang (*opportunity*), dan perbaikan (*preparation*), hidup (Prawirokusumo, 1997).

Selanjutnya kewirausahawan adalah suatu yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis (Ahmad Sanusi, 1994), sedangkan menurut Suharto Prawiro, 1997) Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha. Kewirausahaan muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya, proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2001).

Menurut Zimmerer (1996:51), nilai tambah tersebut dapat diciptakan darimelalui cara-cara sebagai berikut :

1. Pengembangan teknologi baru (*developing new technology*),
2. Penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*),
3. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (*improving existing products or services*),
4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan sumberdaya lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*).

Namun kehidupan dalam kelompok tidak terlepas dari faktor internal kelompok itu sendiri diantaranya :

1. Kemampuan fisik

Jika kemampuan fisik kelompok prima maka cenderung berkinerja maksimal.

Kemampuan fisik bisa melekat pada anggota-anggota kelompok, yang berwujud, misalnya fisiknya, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki kelompok.

2. Kemampuan intelektual

Tingkat pengetahuan, kemauan, kemampuan, keterampilan dan kompetensi yang dimiliki anggota kelompok menentukan kemampuan kelompok untuk berprestasi atau sebaliknya.

3. Karakteristik kepribadian

Kepribadian kelompok yang kondusif untuk berprestasi, misal terbuka, tahan terhadap kritik, inovatif, suka tantangan, suka perubahan senang bekerjasama, dan lain-lain. ( Sopiah, 2008 : 40 )

Selanjutnya untuk meningkatnya usaha kelompok UKM di bidang perikanan darat, diperlukan sistem pengelolaan kelompok ke arah peningkatan produktivitas. Oleh karena itu manusia termasuk sebagai subyek dan obyek dari pembangunan Indonesia tidaklah bisa dibebankan pada bidang produktivitas tetapi harus menjadi beban pemborosan waktu dan biaya yang di timbulkan, seperti birokrasi yang tidak perlu, ekonomi biaya tinggi yang membebani produksi dan distribusi.

Dalam pengendalian mutu terpadu ( *Total Quality Control* ) mengemukakan bahwa konsep produktivitas merupakan suatu sistem manajemen untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Produktivitas memiliki dua dimensi pertama yang mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu mencapai target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan (Umar, 2004). Di samping itu juga pengendalian mutu terpadu juga mengikutsertakan seluruh anggota organisasi dengan penerapan teknik kendali mutu untuk mencapai tingkat produksi yang optimal dengan cara yang efektif dan dengan tingkat efisiensi yang baik.

Menurut Sinungan (2005:119) bidang kerja yang dikembangkan dalam gerakan produktivitas melalui *Total Quality Control* (TQC), di bagi dalam tiga kelompok besar yaitu : bidang administrasi, bidang produksi dan bidang pemasaran. Dengan demikian ada keyakinan yang dapat dipertimbangkan untuk menunjang konsep produktivitas baru yang mengenai proses produksi sebagai sistem yang kompleks, dapat diterapkan dan berlaku dimasyarakat, bagian-bagian yang saling berkaitan ( seperti lingkungan tenaga kerja, modal dan organisasi ). Gordon (Ismawan, 2007:25 ) menyatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada keberhasilannya dalam menciptakan budaya organisasi yang khas sebagai bagian dari rencana dari rencana stratejik mereka.

Konsep pengelolaan usaha yang berbasis produktivitas kelompok dan individu merupakan sebagai faktor modal dan material yang diubah menjadi

faktor material, perlengkapan dan pengetahuan. Selanjutnya Jhon Soeprihanto (Triton , 2007: 81) berpendapat bahwa produktivitas dapat di artikan sebagai perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumberdaya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi (*output*) dengan sumberdaya yang digunakan (input).

Klingner dan Nanbaldian (Trito, 2007: 82) menyatakan bahwa produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai (*effort*), yang didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan pegawai (*ability*) yang diperoleh dari latihan. Produktivitas yang meningkat berarti peromansi yang baik akan menjadi *feedback* bagi usaha, atau motivasi pekerja pada tahap berikutnya. Selain keterkaitan produktivitas dengan usaha dan kemampuan sumberdaya manusia, produktivitas juga memiliki hubungan keterkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.

Dalam konsep penelitian ini, setelah diberikan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun terhadap kelompok UKM untuk bidang perikanan darat, maka usaha kelompok dapat meningkat. Dengan meningkatnya usaha kelompok, pendapatan kelompok akan meningkat, sehingga dana pinjaman kelompok dapat dikembalikan tepat waktu.

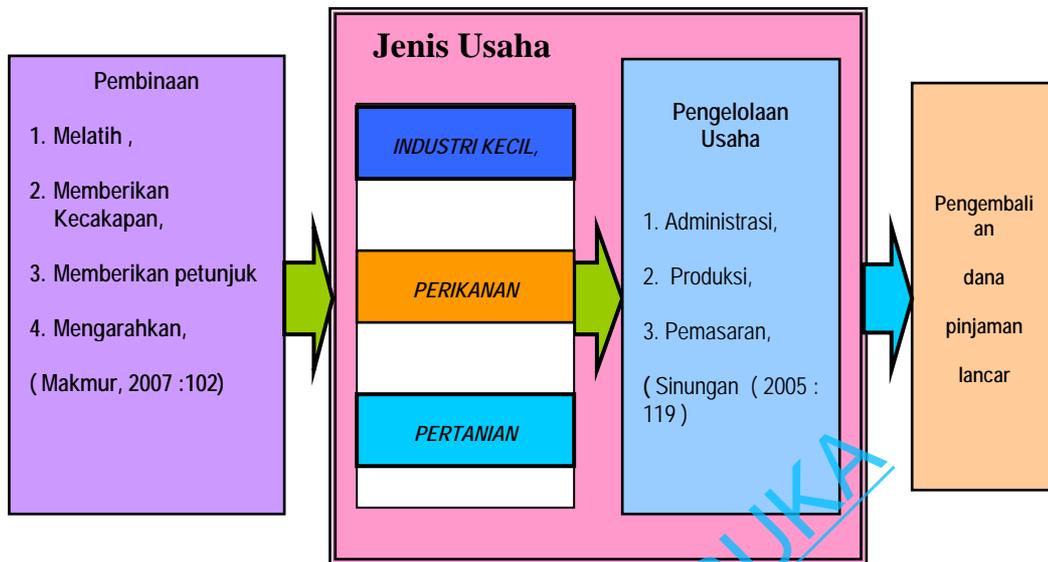
## **B. KERANGKA TEORI**

Bertitik tolak dari tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karimun, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, menyusun arah dan kebijakan program pembangunan yang berdimensi ekonomi kerakyatan. Adapun program

yang disusun oleh pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu peningkatan Usaha Kecil Menengah ( UKM ). Supaya kegiatan kelompok usaha yang dikembangkan saat ini lebih terarah dan berkesinambungan serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik, maka perlu dilakukan pembinaan dari tim teknis.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun diharapkan mampu memberikan pembinaan kepada kelompok pengelola dana UKM, baik yang bersifat administrasi, produksi dan pemasaran. sistem pengelolaan terhadap dana Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dapat lebih berkembang dan pengembalian modal tepat waktu. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tebing karena permasalahan yang dihadapi oleh kelompok UKM di Kabupaten Karimun mayoritas sama. Permasalahan ini lebih mengarah pada jenis usaha perikanan karena permasalahan ini dianggap sudah mewakili terhadap permasalahan jenis usaha lainnya yang ada di Kecamatan Tebing.

Di era sekarang ini yang menjadi tanggung jawab terhadap pengembangan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) masyarakat miskin yaitu pemerintah daerah, karena diharapkan melalui sistem otonomi daerah ini masyarakat terayomi, terbina dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.



Gambar 1 : Kerangka Teori

Penelitian ini lebih mengarahkan pada pembinaan sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 Pasal 6 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang lebih menitik beratkan pada bidang produksi dan pengolahan, yaitu;

- Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi pengolahan;
- Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- Menyediakan tenaga konsultan profesionaldi bidang produksi dan pengolahan.

Adapun konsep pembinaan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, yaitu konsep yang dikemukakan oleh Makmur ( 2007 : 102 ) yaitu : melatih , memberikan kecakapan, memberikan petunjuk dan mengarahkan, sedangkan

instansi teknis yang menjadi objek penelitian ini yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, karena pada kelompok jenis usaha dibidang perikanan memiliki permasalahan yang sama didalam pengelolaan dana yaitu tersendatnya sistem pengembalian pinjaman dana UKM.

### **C. HIPOTESIS**

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian konsep teori pembinaan dan konsep pengelola usaha maka hipotesa penelitian ini adalah : Besarnya tingkatan kemampuan pengelola usaha dalam pengembalian pinjaman UKM ditentukan oleh dimensi pelatihan, memberi kecakapan, memberi petunjuk dan pengarahan.

### **D. DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL**

Untuk lebih terarahnya penulisan pada penelitian tentang pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten dalam meningkatkan kemampuan pengelola usaha pengguna dana UKM di Kecamatan Tebing Karimun, maka disusun konsep operasional dan pengukuran, sebagai berikut :

Tabel 2. Konsep operasional penelitian variabel Pembinaan dan Variabel Pengelolaan Usaha.

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	PEMBINAAN	1. Melatih , 2. Memberikan Kecakapan, 3. Memberikan petunjuk 4. Mengarahkan, ( Makmur : 102)	a. Meningkatkan pengetahuan, b. Kelompok berjalan secara maksimal, c. Mengikut sertakan pengelola usaha dalam pelatihan a. Pengelola usaha peka terhadap perkembangan usaha , b. Pengelola mampu dalam pengembanga kelompok. a. Pengelola usaha bekerja sesuai dengan panduan usaha, b. Pengelola usaha mempunyai visi, tujuan, dan sasaran a. Pengelolaan usaha dapat mengerjakan usaha dengan baik,
2	PENGELOLAAN USAHA	1. Bidang Administrasi 2. Bidang Produksi 3. Bidang Pemasaran ( Sinungan ( 2005 : 119 )	a. Perbaikan disiplin kerja, b. Pemanfaatan secara maksimaljam kerja, c. Perbaikan lingkungan kerja, d. Perbaikan sistem dan metode kerja. a. Mengurangi/ menghilangkan lost time, b. Mengurangi kecelakaan kerja, c. Menjaga kebersihan lingkungan kerja, d. Pencatatan hasil kerja, e. Perbaikan sistem dan metode produksi. a. Perbaikan sistem dan metode pemasaran, b. Perbaikan saluran pemasaran, c. Penekanan biaya pemasaran dengan target sama, d. Perbaikan sistem penentuan harga jual.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. DESAIN PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan pendekatan *Kuantitatif*. Secara *kuantitatif* penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh yang timbul akibat variabel bebas yaitu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan selaku tim teknis kabupaten terhadap variabel terikat yaitu Pengelolaan Usaha pada bidang perikanan darat selaku kelompok UKM yang terdapat di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Dengan harapan hasil analisis ini nantinya dapat menguji hipotesis yang diajukan dan menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

##### ***Variabel Penelitian***

Variabel yang akan diukur pada penelitian ini meliputi Pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis ( Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun ) sebagai variabel bebas ( X ) dan Pengelolaan usaha dari bidang jenis usaha perikanan darat pada kelompok UKM yang terdapat di Kecamatan Tebing sebagai variabel terikat ( Y ).

##### **B. POPULASI DAN SAMPEL**

###### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan elemen yang hendak dijelaskan oleh

peneliti melalui penelitiannya ( Irawan, 2005 : 9.9 ). Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengelola usaha Pengguna dana Usaha Kecil Menengah ( UKM ) yang ada di Kecamatan Tebing. Adapun alasannya karena permasalahan yang dialami oleh pengelola kelompok UKM mayoritas sama dengan kecamatan lainnya yaitu berkaitan dengan kemacetan pengembalian dana UKM oleh kelompok. Berkaitan dengan hal tersebut, maka populasi ditetapkan kelompok yang menggunakan dana UKM dan lokasi penelitian di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Dari tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007 terdapat 9 ( sembilan ) kelompok yang menggunakan dana UKM khususnya dibidang perikanan air tawar di Kecamatan Tebing.

## 2. Sampel

Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini, yaitu kelompok usaha perikanan darat yang ada di Kecamatan Tebing. Untuk penentuan sample penelitian ini diambil sebanyak 100 % dari populasi yang ada melalui metode *sensus*, yaitu pengambilan jumlah dan penentuan kelompok UKM ditentukan secara sengaja, mengingat jumlah kelompok yang menjadi sampel sangat kecil, juga dianggap permasalahan kelompok yang ada sudah mewakili terhadap kelompok yang ada di Kabupaten Karimun. Lebih jelasnya jumlah kelompok untuk dijadikan sampel dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 3. Nama kelompok dan anggota kelompok pengelola usaha budidaya air tawar

NO	NAMA	JUMLAH PINJAMAN ANGGOTA	ALAMAT
1	Panca Lestari	6 Orang	Pamak
2	Panca Rajawali	6 Orang	Pamak
3	Prasetia Karya	6 Orang	Pamak
4	Paten Jaya	6 Orang	Pongkar
5	Bangunsari	4 Orang	Bangunsari
6	Kawan Sejalan	4 Orang	Alorjongkong
7	Bosmijaya Nazihir	8 Orang	Tl.Uma
8	Nasrun Klp pancing	4 Orang	Tl.Uma
9	Ar-raudah	6 Orang	Tl. Uma
JUMLAH		50 Orang	

Sumber : Kantor Camat Tebing, Tahun 2008

Sedangkan tim teknis yang dijadikan sample dalam penelitian ini adalah tenaga pembinaan kelompok Usaha Kecil Menengah ( UKM ), yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, dan 2 (dua) orang Kepala Bidang yang terlibat langsung memberikan pembinaan kepada kelompok UKM.

### C. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu

menyediakan kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan tertutup, kemudian disebarakan kepada responden penelitian.

#### **D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Kuesioner yaitu menyediakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian dan selanjutnya disebarakan ke responden yang menjadi sample dalam penelitian ini,
2. Wawancara yaitu melakukan tatap muka langsung ke responden dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, bertujuan untuk memperkaya data pendukung pelaksanaan penelitian,
3. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, bertujuan untuk dapat melihat secara langsung pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis ( Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun ) terhadap pengelolaan usaha kelompok pengguna dana UKM,
4. Studi Kepustakaan yaitu melakukan pengkajian melalui perpustakaan, terhadap hasil kerja peneliti terdahulu, bertujuan untuk mencari konsep atau teori pendukung penelitian ini.

#### **E. ANALISIS DATA**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa *deskriptif kuantitatif*, karena data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisa dengan

menggunakan tabel frekuensi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mengambil kesimpulan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Adapun langkah-langkah pengolahan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengelompokkan data-data kualitatif sejenis dari hasil penelitian, baik data yang berkaitan dengan Pembinaan tim teknis tingkat kabupaten maupun data pengelolaan usaha dalam pengembalian pinjaman dana UKM di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun,
2. Mentabulasikan data yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis data, gunanya untuk mempermudah melakukan perhitungan secara *kuantitatif*.
3. Pemberian skor penilaian terhadap setiap hasil jawaban responden, baik variabel Pembinaan tim teknis tingkat kabupaten maupun variabel pengelolaan usaha dalam pengembalian pinjaman dana UKM. Penentuan nilai ( skor ) dari setiap jawaban responden dalam kuesioner ditentukan dengan menggunakan *skala likert*, yang di klasifikasikan dalam 5 (lima) kategori dan diberi skor antara 1 sampai dengan 5 ( Singarimbun dan Effendi, 1989 : 78 ), yaitu :

Kategori	Bobot Nilai ( + )	Bobot Nilai ( - )
a. Sangat setuju/sangat memuaskan	5	1
b. Setuju/ memuaskan	4	2
c. Cukup setuju/ cukup memuaskan	3	3
d. Kurang setuju/kurang memuaskan	2	4
e. Tidak setuju/tidak memuaskan	1	5

4. Pengolahan data, dilakukan dengan menganalisa data *kuantitatif* yang dibangun atas dasar pengumpulan data yang telah dilakukan. Data yang telah dikumpulkan disusun dan disajikan dengan menggunakan *distribusi frekuensi* yang akan memudahkan *interpretasi* data *kuantitatif*.
5. Untuk melihat tingkat perbandingan antara variabel x dengan variabel y, digunakan uji t sedangkan untuk menentukan nilai t tabel menggunakan tabel distribusi t yang digunakan sebesar 0,05 % untuk uji satu pihak dan 0,01 % untuk uji dua pihak . Adapun rumus untuk menentukan besarnya nilai korelasi populasi, adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

- r = Nilai korelasi sampel,
- n = Jumlah pengamatan,
- t = Hasil nilai uji hitung.

Besarnya nilai keterkaitan antara variabel x dan variabel y menurut Young dikategorikan sebagai berikut :

- a. 0,7 – 1,00 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat hubungan yang tinggi,
- b. 0,4 - 0,7 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat hubungan yang sub stansial,

- c. 0,2 - 0,4 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat hubungan yang rendah,
- d.  $< 0,2$  baik positif maupun negatif, hubungan dapat diabaikan. (C. Trihendradi, 2007 : 145 )
6. Dilakukan uji regresi Linear beberapa variabel independen. Uji regresi digunakan untuk meramalkan suatu variabel ( variabel dependent ) berdasar satu variabel atau beberapa variabel lain ( variebel independen) dalam suatu persamaan linear. Pada tabel Model Summary, kolom adalah koefisien korelasi pearson yang menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi antara variabel pembinaan tim teknis dan pengelolaan usaha, sedangkan tabel Anova memaparkan uji kelinearan. Jika hasil hitung ( F ) lebih besar, dari hasil tabel maka  $H_0$  di tolak dan menerima  $H_1$ , Untuk signifikansinya terdapat hipotesis dan pengambilan keputusan dalam penelitian ini, maka Hipotesisnya yaitu  $H_0$  berarti tidak ada hubungan antara dua variabe, Sedangkan metode pengambilan keputusan pada penelitian ini yaitu jika probabilitas  $> 0,05$  berarti tidak signifikan maka  $H_0$  diterima, jika probabilitas  $< 0,05$  berarti signifikan maka  $H_0$  ditolak, dan jika probabilitas  $< 0,01$  berarti signifikan pada taraf 1 % maka  $H_0$  ditolak.
8. Uji determinan, analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa persentase variabel x antara Pembinaan tim teknis terhadap variabel terikat y (pengelolaan usaha). Koefisien determinan dihitung dengan cara mengkuadratkan nilai  $r$  (  $r^2$  ) atau r square pada output SPSS.

Selanjutnya dari hasil pengolahan data tersebut, penulis paparkan dalam uraian berupa kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti oleh khalayak. Hasil pengolahan data ini di cek kebenarannya dengan hasil wawancara, sehingga menghasilkan temuan penelitian berupa dimensi-dimensi lain yang memperkaya dimensi yang ada, akhirnya mempermudah penyusunan kesimpulan dan saran penelitian ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Kondisi Geografi Kecamatan Tebing

Kecamatan Tebing merupakan salah satu kecamatan pemekaran yang berada di wilayah Kabupaten Karimun. Dengan adanya pemekaran Kabupaten Karimun membuka peluang masyarakat untuk lebih maju dalam pembangunan disegala bidang khususnya di Kecamatan Tebing.

Kecamatan Tebing memiliki masyarakat yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya, Suku Minang Kabau, Suku Bugis, Suku Banjar, Suku Batak, Suku Jawa, Suku Flores, bersama-sama Suku Asli Melayu Karimun membangun Kabupaten Karimun.

Kecamatan Tebing terdapat dua buah pulau besar dan kecil dengan luas area daratan  $\pm 72 \text{ KM}^2$  dan luas perairan  $\pm 1012 \text{ KM}^2$ , secara giografis Kecamatan Tebing berbatasan langsung dengan perairan Negara Tetangga Malaysia.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tebing adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatas dengan perairan Malaysia,
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Kecamatan Karimun,
- Sebelah Barat, berbatas dengan Kabupaten Meral,
- Sebelah Timur, berbatas dengan Kecamatan Karimun.

Berdasarkan peta topografi yang dikeluarkan oleh Bako Surtanal, keadaan topografi Kecamatan Tebing berpariasi dari 0 sampai 570 meter diatas

permukaan air laut rata-rata (MSL). Keadaan topografi Kecamatan Tebing sebagian besar merupakan daerah berbukit dengan kemiringan antara 2 sampai 5 derajat. Daerah ini juga terdapat lembah dangkal dan rawa-rawa.

Wilayah Kecamatan Tebing juga merupakan bagian paparan kontinental yang terkenal dengan "PAPARAN SUNDA". Bagian yang tersingkap kebanyakan merupakan batuan-batuan metamort atau batuan baku yang berumur Pra-tertier, penyebaran batu sediment yang sangat terbatas. Di Kecamatan Tebing tidak terdapat gunung berapi, yang ada merupakan pegunungan tinggi yang dikenal oleh penduduk dengan sebutan Gunung Jantan dan Gunung Betina.

Pada umumnya daerah Kecamatan Tebing beriklim baasah dengan temperatur udara rata-rata terendah 22° C dan tertinggi 34° C, dengan kelembaban udara 85 % dan rata-rata curah hujan 3200 mm/tahun. Kecamatan Tebing mengalami perubahan angin sebagai berikut :

- Musim Angin Timur bulan Maret s/d Juni, keadaan laut tenang, cuaca panas dan kering.
- Musim Angin Selatan bulan Juni s/d Agustus, keadaan angin kencang dan banyak turun hujan.
- Musim Angin Barat, bulan September s/d Nopember, angin sesekali ribut/ angin kencang ( cuaca lembab/ hujan ).

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan perkembangan penduduk maka untuk mempermudah jangkauan dalam pelayanan masyarakat, pemerintah Kabupaten Karimun melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan maka Kecamatan Tebing terdiri dari enam kelurahan dan satu desa.

Tabel 4. Luas wilayah setiap kelurahan di Kecamatan Tebing keadaan akhir 2007

NO	KELURAHAN/DESA	LUAS ( Km <sup>2</sup> )	%
1	2	3	4
1	Kelurahan Kapling	3	4,2
2	Kelurahan Tebing	7	9,2
3	Kelurahan Harjosari	5	6,9
4	Kelurahan Teluk uma	5	6,9
5	Kelurahan Pamak	7	8,3
6	Kelurahan Darussalam	6	27,7
7	Desa Pongkar	20	

Sumber : Kantor Camat Tebing, tahun 2007.

Dari tabel di atas terlihat bahwa, Luas wilayah Kecamatan Tebing yang  $\pm 53$  Km<sup>2</sup> terdiri dari daratan dan lautan, sedangkan yang dihuni oleh penduduk hanya  $\pm 21$  Km<sup>2</sup> dan lainnya masih belum tergarap oleh masyarakat. Desa Pongkar di Kecamatan Tebing memiliki Luas Wilayah  $\pm 20$  Km<sup>2</sup> dan merupakan desa terluas dari kelurahan-kelurahan yang ada. Di samping itu juga Kecamatan Tebing termasuk desa penghasil granit terbesar yang ada di Kabupaten Karimun. Hasil produksi granit di pasarkan ke Luar Negeri, seperti Singapura, Malaysia dan ke negara lainnya.

Sumber daya alam yang ada di Kecamatan Tebing, masih memiliki kemungkinan untuk di gali potensi yang bertujuan mencapai kemakmuran masyarakat, baik bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan sektor

lainnya. Pengembangan jenis usaha sangat dipengaruhi kemampuan sumber daya manusia untuk memandang peluang-peluang yang muncul, sehingga peluang tersebut akan memberikan kontribusi bagi individu maupun daerah setempat.

#### **4.1.2. Penduduk.**

Masalah penduduk dikecamatan Tebing sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai apabila tingkat kesejahteraan tidak diperhatikan. Pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, pasangan usia subur dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Penduduk Kecamatan Tebing berdasarkan hasil pendataan penduduk tahun 2007 dan pemutahiran data penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun berjumlah 23.992 jiwa, terdiri dari laki-laki 12.398 jiwa dan perempuan 11.594 jiwa, jika dilihat dari angka pertambahan penduduk di Kecamatan Tebing terdapat sebesar 3,51%, hal ini dapat dilihat pada 2 tahun terakhir berdasarkan hasil register 2005 jumlah penduduk sebanyak 22. 445 jiwa, sedangkan untuk tahun 2006 sebanyak 23.149 jiwa.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 dengan tahun 2007 dari 7 ( tujuh ) kelurahan dan desa di Kecamatan Tebing, maka

kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Tebing yakni 333 jiwa setiap/Km<sup>2</sup>. Lebih jelasnya jumlah penduduk per desa/kelurahan Se-Kecamatan Tebing menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin perdesa kelurahan tahun 2007

NO	KELURAHAN/DESA	LK	PR	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	TEBING	2.372	2.268	4.640
2	TELUK UMA	2.546	2.387	4.933
3	KAPLING	1.809	1.719	3.528
4	PAMAK	1.784	1.665	3.449
5	HARJOSARI	1.332	1.203	2535
6	DARUSSALAM	1.518	1.392	2.910
7	PONGKAR	1.037	960	1997
JUMLAH		2.398	11.594	23.992

Sumber : Dinas Kependudukan, Capil dan KB Tahun 2008.

Dengan kondisi geografis tersebut berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat diantaranya nelayan ( 42% ), petani ( 16 % ), pedagang ( 14 % ), pegawai daerah ( 11 % ), pegawai swasta ( 17 % ). Untuk mendukung azam Kabupaten Karimun yaitu membangkit ekonomi kerakyatan melalui program UKM, harapan pemerintah dengan masyarakat Kecamatan Tebing agar dapat memanfaatkan fotensi sumber daya alam yang ada, tidak hanya terpaku terhadap kondisi yang ada namun dapat melihat peluang lain sebagai mata pencaharian untuk dapat menekan garis kemiskinan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Tebing.

Namun kesemuanya itu juga harus diiringi dengan sumber daya manusia yang ada, untuk itu pemerintah melalui tim teknis bertanggung jawab membina

masyarakat dalam pengelolaan usaha, hal ini juga disebabkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, kenyataan dilapangan pengelolaan usaha yang menggunakan dana UKM mayoritas macet dalam pengembalian.

#### **4.1.3. Kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan daerah/kota, salah satu kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh daerah sebagai daerah otonom adalah dibidang pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 tahun 2007 tentang Penjabaran tugas dan fungsi dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, maka perlunya dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu Dinas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana kondisi Kabupaten Karimun memiliki wilayah kelautan yang sangat luas, dan berbatasan dengan negara tetangga yaitu Negara Singapura dan Negara Malaysia sebagai peluang besar pengelolaan hasil perikanan maupun budidaya.

Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun termasuk sebagai tim teknis kabupaten dalam pelaksanaan program UKM menangani dan melayani masyarakat yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan program UKM tersebut.

#### **4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun memiliki tenaga pegawai sebagai pelaksana pemerintahan dibidang perikanan sebanyak 50 orang dan membentuk UPTD di masing-masing kecamatan yaitu: Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral dan Kecamatan Karimun. Untuk satu UPTD dengan jumlah pegawai sebanyak enam orang, sedangkan UPTD Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat hanya memiliki satu UPTD dengan jumlah pegawai dua orang, Kecamatan Buru memiliki satu UPTD dengan jumlah pegawai satu orang , Kecamatan Moro memiliki satu UPTD dengan jumlah pegawai satu orang dan Kecamatan Durai memiliki satu UPTD dengan jumlah satu orang.

Untuk terlaksananya tugas pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan, juga sangat ditentukan oleh kemampuan SDM yang dimiliki oleh pegawai, baik pangkat dan golongan. Lebih jelasnya jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun di tinjau dari Pangkat dan Golongan yang dimiliki, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan.

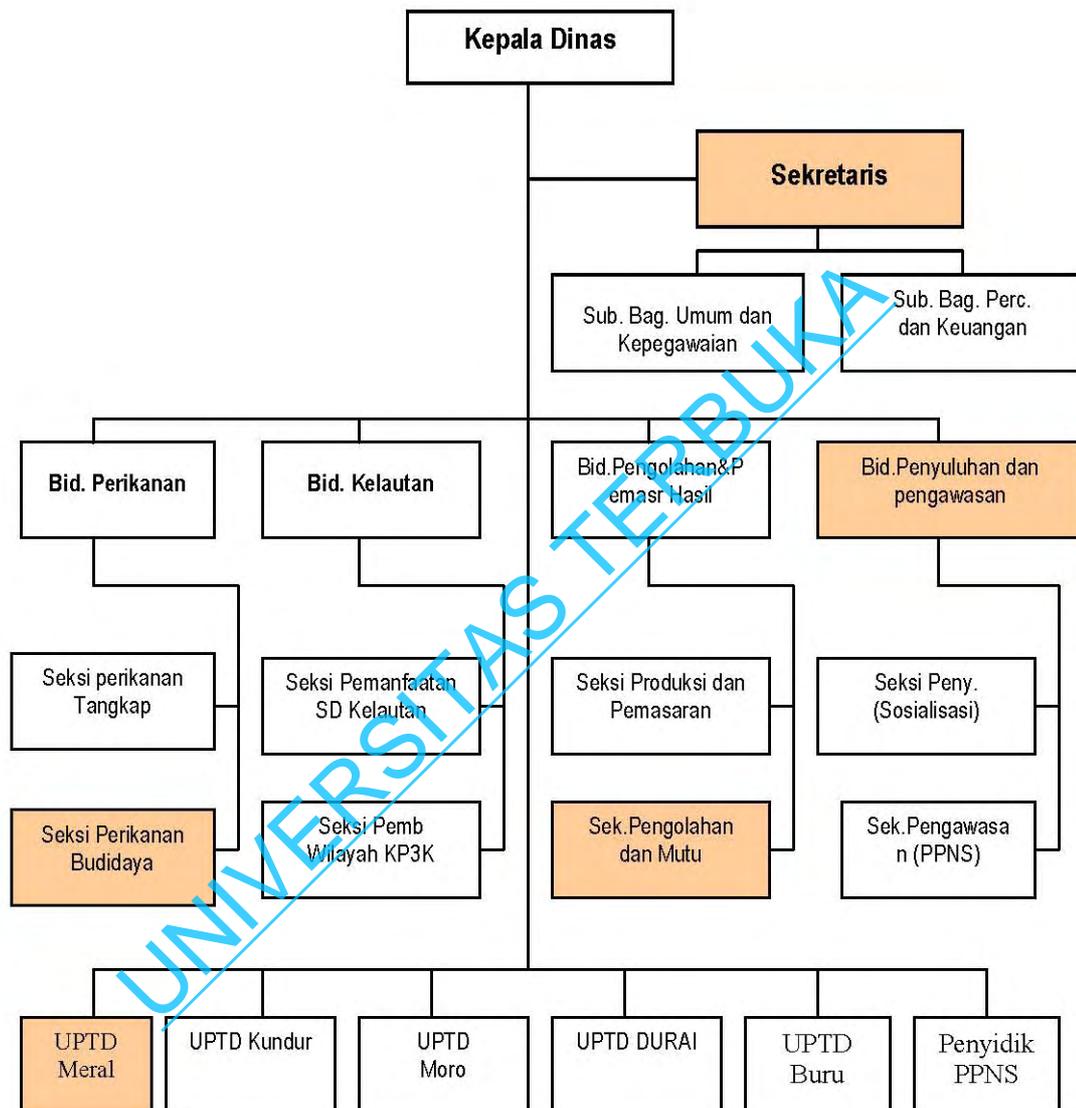
No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	2	4 %
2	Golongan III	22	44 %
3	Golongan II	10	20 %
4	Golongan I	0	0 %
5	Tenaga Honorer	16	32 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.

Dari tabel diatas, bahwa struktur Pegawai dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang berpangkat/golongan yang terbanyak yakni golongan III sebanyak 22 orang atau 44 %, diikuti oleh tenaga honorer daerah maupun tenaga honorer pusat sebanyak 16 orang atau 32 %, sedangkan untuk golongan II berjumlah 10 orang atau 20 %, dan diikuti oleh golongan II sebanyak 2 orang atau 4 %.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Karimun



Berdasarkan struktur organisasi diatas, terlihat bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 8 (delapan) orang Seksi, 2 (dua) orang Kasubbag, 5 (lima) orang UPTD dan 1 (satu) orang Penyidik PPNS.

Dalam kegiatan pembinaan terhadap kelompok UKM Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun yang termasuk dalam tim pengelolaan telah melakukan pembinaan terhadap pengelola Usaha di Kecamatan Tebing. Adapun bidang yang langsung memberikan pembinaan kepada kelompok UKM yaitu : Sekretaris, Bidang Perikanan, Bidang Kelautan, Bidang pengolahan dan pemasaran dan Bidang penyuluhan dan pengawasan.

Oleh karena penelitian ini bersasaran pada kelompok usaha perikanan darat, maka pada Bidang Perikanan yang memberikan pembinaan yaitu Seksi perikanan budidaya, Bidang pengolahan dan pemasaran hasil yang memberikan pembinaan Seksi pengolahan dan mutu, Bidang penyuluhan dan Pengawasan pembinaan dilakukan langsung dengan membentuk tim penyuluhan dan pengawasan yang terdiri dari seksi penyuluhan ( Sosialisasi ) dan seksi pengawasan ( PPNS ).

Selanjutnya di samping pembinaan terhadap kelompok UKM oleh bidang, juga dilakukan UPTD untuk wilayah meral dan tebing. Sedangkan untuk jenis kelompok usaha perikanan darat ini, adapun bidang yang jarang dilibatkan untuk memberikan pembinaan pengelolaan kelompok UKM ini yaitu Bidang kelautan, karena bidang ini lebih berorientasi pada jenis usaha kelompok perikanan laut. Untuk teknis pembinaan selalu dilakukan secara bergantian dari masing-masing bidang yang disesuaikan dengan modul dan disebabkan perkembangan teknologi terapan terkini dalam pengembangan usaha kelompok UKM.

#### 4.1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Pengembangan program Usaha Kecil Menengah ( UKM ) yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi salah satu program ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mengali potensi sumber daya alam yang ada, menumbuh kembangkan sektor swasta, menciptakan lapangan kerja yang produktif dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di masing-masing daerah.

Keberhasilan program Usaha Kecil Menengah ( UKM ) tergantung pada sistem pembinaan yang dilakukan dan berpengaruh terhadap faktor pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan tim pembinaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel. 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

No	GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	SARMUD	S1/S2	
1	GOL. IV	-	-	-	-	2	2
2	GOL. III	-	-	1	-	21	22
3	GOL. II	1	1	6	2	-	10
4	GOL. I	-	-	-	-	-	-
5	HONORER	-	-	12	-	4	16
Jumlah		1	1	19	2	27	50

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun dari 50 pegawai/honorar terdapat 29 atau

58 % pegawai/honorer yang berpendidikan S1/S2 dan 19 atau 38 % pegawai/honorer yang berpendidikan SLTA. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun di kategorikan cukup tinggi, karena pegawai/honorer mayoritas berpendidikan Sarjana Muda dan S1/S2. Di tinjau dari tenaga pembinaan terhadap pengelola usaha kelompok di pandang sangat memadai, tetapi faktor pendidikan kelompok juga sangat penentu keberhasilan di dalam pengembangan pinjaman dana UKM.

Pembentukan dan pengembangan kelompok diawali dari proses perencanaan, apabila arah dan tujuan yang akan dikembangkan dengan memperoleh dana bantuan kurang jelas sudah tentu pemanfaatan dana pinjaman tidak terarah. Oleh karena itu pengembangan kelompok harus melalui proses perencanaan dan adanya sistem pengelolaan organisasi yang terarah.

Keberhasilan kelompok juga sangat berpengaruh terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada didalam kelompok usaha, karena SDM yang optimal akan berpengaruh terhadap daya serap dan penerimaan materi pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis terhadap pengelolaan usaha, serta dimiliki kemampuan membaca peluang-peluang untuk kemajuan usaha.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan anggota kelompok pengguna dana pinjaman UKM, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel . 8 Jumlah anggota Usaha Kelompok Pengguna Dana UKM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	SD	32	64,0
2	SLTP	15	30,0
3	SLTA	3	6,0
5	SARMUD	-	-
6	S1 / S2	-	-
JUMLAH		50	100

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 50 orang anggota kelompok pengelola dana pinjaman UKM, terdapat 32 atau 64,0 % orang yang berpendidikan SD dan hanya 3 atau ( 6,0 % ) orang yang berpendidikan SLTP. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan anggota kelompok pengelola dana UKM relatif rendah, hal ini yang membuat daya serap materi pembinaan yang di sampaikan oleh tim pembinaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun sulit untuk diimplementasikan, di samping itu perencanaan usaha dan pengorganisasian kelompok tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

#### 4.2 Hasil Uji Validasi dan Realibitas Alat Ukur.

Sebelum kuesioner disebarakan kepada seluruh responden, dilakukan uji coba kuesioner dengan menyebarkan kuesioner kepada 2 (dua) orang kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, sedangkan untuk kelompok hanya dipilih 2 ( dua ) kelompok . Hal ini dilakukan karena dianggap jumlah tersebut sudah cukup mewakili seluruh responden yang dituju. Uji coba ini

dilakukan dengan menguji tingkat validasi dan reliabilitas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Butir pertanyaan dikatakan valid jika angka  $r$  lebih besar dari 0,3.(Azwar 2003:158)

Suatu alat pengukur dikatakan reabel (andal) adalah bila alat pengukur tersebut mampu memberikan pengukuran secara ajeg sesuai dengan apa yang telah diukurinya dan sejauhmana alat pengukur tersebut sama dengan dirinya sendiri (*constitency*). Pengujian terhadap tingkat keandalan kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu paket komputer pengolahan data statistika, yaitu SPSS V. 15 dengan menggunakan alpha cronbach. Variabel dikatakan riabel bila koefisien alpha lebih besar dari 0,3. Hasil pengolahan data uji validitas dan uji reabilitas terhadap butir-butir pertanyaan akan dipaparkan pada tabel berikutnya.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Pada uraian terdahulu telah dikemukakan tentang variabel penelitian dan operasionalisasi variabel yaitu variabel Pembinaan (X) yang merupakan variabel bebas dan Pengelola usaha (Y) variabel terikat. Setiap variabel memiliki beberapa sub variabel dan setiap sub variabel diukur melalui beberapa indikator.

Dalam rangka pengukuran, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya daftar pertanyaan ( kuesioner ) dengan lima alternatif jawaban yang diberi skor : 5, 4, 3, 2, 1. Untuk variabel bebas (X) terdiri atas 4 sub variabel ( Melatih, Memberikan kecakapan, Memberikan

petunjuk, Mengarahkan) sedangkan variabel terikat (Y) terdiri atas 3 sub variabel ( Bidang Administrasi, Bidang Produksi dan Bidang Pemasaran).

Selanjutnya untuk melengkapi data, agar memperkuat fakta serta tingkat kepercayaan dalam rangka memperoleh kebenaran objektif, penelitian ini juga dilengkapi dengan metode wawancara dan observasi terhadap responden dan hasilnya dipaparkan sebagai berikut.

#### 4.3 Analisis Pembinaan Tim Teknis

Variabel pembinaan diukur melalui 4 ( empat ) sub variabel. Pada sub variabel pertama dioperasionalkan ke dalam 3 ( tiga ) indikator dengan 17 pertanyaan. Sub variabel kedua dioperasionalkan ke dalam 2 ( dua ) indikator dengan 10 pertanyaan, sub variabel ketiga dioperasionalkan ke dalam 2 ( dua ) indikator dengan 6 ( enam ) pertanyaan dan sub variabel keempat dioperasionalkan dalam 1 ( satu ) indikator dengan 5 ( lima ) pertanyaan.

Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel bebas ( X ) memiliki 8 (delapan) indikator dan memiliki 38 pertanyaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembinaan yang dilaksanakan oleh tim teknis terhadap pengelola usaha Kecamatan Tebing, dapat ditinjau dari masing masing variabel sebagai berikut:

##### 4.3.1 Pembinaan Melatih.

Variabel pembinaan pada dimensi melatih yang dilakukan oleh tim teknis tingkat kabupaten dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, merupakan salah satu bagian dari variabel pembinaan yang terdiri dari

17 item pertanyaan. Tingkat validitas dan reliabilitas variabel pembinaan dilakukan melalui pengujian. Lebih jelasnya terhadap hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Hasil uji validitas dimensi melatih dari variabel pembinaan tim teknis kabupaten, tahun 2008.

ITEM	r hitung	r tabel % 0,05 , n = 10	Keputusan
1	0,914	> 0,632	Valid
2	- 0,029	< 0,632	Tidak Valid
3	0,734	> 0,632	Valid
4	- 0,024	< 0,632	Tidak Valid
5	0,892	> 0,632	Valid
6	0,961	> 0,632	Valid
7	0,761	> 0,632	Valid
8	0,953	> 0,632	Valid
9	0,350	< 0,632	Tidak Valid
10	0,745	> 0,632	Valid
11	0,850	> 0,632	Valid
12	0,868	> 0,632	Valid
13	0,367	< 0,632	Tidak Valid
14	0,953	> 0,632	Valid
15	0,880	> 0,632	Valid
16	0,868	> 0,632	Valid
17	0,983	> 0,632	Valid

Sumber : Data primer hasil olahan.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dari 17 butir pertanyaan indikator meningkatnya pengetahuan pada variabel Pembinaan Tim Teknis, terdapat 13 butir pertanyaan yang valid dan 4 (empat) butir pertanyaan tidak valid. Jadi butir pertanyaan pada indikator meningkatnya pengetahuan dari variabel pembinaan yang dapat digunakan untuk analisa selanjutnya berjumlah 13 butir, Sedangkan taraf signifikan yang digunakan 5 % dan n = 10. Adapun butir pertanyaan yang tidak valid, yaitu :

- a. Pembinaan tim terhadap penyusunan rencana pengelola usaha kelompok,

- b. Pembinaan tim terhadap pengorganisasian pengelolaan usaha kelompok,
- c. Mengikutsertakan pengelola usaha kelompok pada kegiatan lokakarya,
- d. Pemberian bantuan pembibitan kepada pengelola kelompok.

Adapun penyebab tidak validnya jawaban dari pertanyaan butir variabel pembinaan, yaitu disebabkan responden tidak pernah mendapatkan pembinaan tentang masalah dimaksud, juga disebabkan kurangnya pemahaman responden terhadap pembinaan yang diberikan.

#### 4.3.2 Memberikan Kecakapan

Variabel pembinaan pada dimensi memberikan kecakapan kepada pengelola usaha kelompok yang dilakukan oleh tim teknis tingkat kabupaten, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, merupakan salah satu bagian dari variabel pembinaan yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Tingkat validitas dan reliabilitas variabel pembinaan dilakukan melalui pengujian. Lebih jelasnya hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Hasil uji validitas dimensi memberikan kecakapan dari variabel pembinaan tim teknis kabupaten, tahun 2008.

ITEM	r hitung	r tabel % 0,05 , n = 10	Keputusan
1	-0,199	< 0,632	Tidak Valid
2	0,761	> 0,632	Valid
3	0,789	> 0,632	Valid
4	0,901	> 0,632	Valid
5	0,528	< 0,632	Tidak Valid
6	0,477	< 0,632	Tidak Valid
7	0,528	< 0,632	Tidak Valid
8	0,505	< 0,632	Tidak Valid
9	0,654	> 0,632	Valid
10	0,901	> 0,632	Valid

Sumber : Data primer hasil olahan.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 10 butir pertanyaan dari dimensi memberikan kecakapan pada variabel pembinaan tim teknis, terdapat 5 (lima) butir pertanyaan yang valid dan 5 (lima) butir pertanyaan tidak valid. Jadi butir pertanyaan pada dimensi memberikan kecakapan dari variabel pembinaan yang dapat digunakan untuk analisa selanjutnya berjumlah 5 butir, Sedangkan taraf signifikan yang digunakan 5 % dan  $n = 10$ . Adapun butir pertanyaan yang tidak valid, yaitu :

- a. Pembinaan oleh tim teknis terhadap pengelolaan usaha kelompok tentang pasar produksi,
- b. Mendatangkan tenaga profesional untuk melatih pengelola usaha kelompok tentang usaha pembuatan makanan ikan yang berkualitas.
- c. Mendatangkan tenaga profesional di bidang pemasaran hasil usaha untuk melatih pengelola usaha,
- d. Mendatangkan tenaga profesional di bidang pemasaran hasil usaha untuk melatih pengelola usaha kearah lebih maju,
- e. Mendatangkan tenaga profesional di bidang pemasaran hasil usaha untuk melatih pengelola usaha sesuai dengan standar.

Adapun penyebab tidak validnya jawaban dari pertanyaan butir dimensi memberikan kecakapan, yaitu disebabkan responden tidak pernah mendapatkan pembinaan dimaksud, dan tidak pernah tenaga profesional datang kelompok untuk memberikan pembinaan terhadap pengelola usaha kelompok.

### 4.3.3 Memberikan Petunjuk

Variabel pembinaan pada dimensi memberikan petunjuk kepada pengelola usaha kelompok yang dilakukan oleh tim teknis tingkat kabupaten, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun merupakan salah satu bagian dari variabel pembinaan yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan. Tingkat validitas dan reliabilitas variabel pembinaan dilakukan melalui pengujian. Lebih jelasnya hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Hasil uji validitas dimensi memberikan petunjuk dari variabel pembinaan tim teknis kabupaten, tahun 2008.

ITEM	r hitung	r tabel % 0,05 , n = 10	Keputusan
1	0,361	< 0,632	Tidak Valid
2	0,883	> 0,632	Valid
3	0,068	< 0,632	Tidak Valid
4	0,000	< 0,632	Tidak Valid
5	0,116	< 0,632	Tidak Valid
6	0,000	< 0,632	Tidak Valid

Sumber : Data primer hasil olahan.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 6 (enam) butir pertanyaan dari dimensi memberikan petunjuk pada variabel Pembinaan Tim Teknis, terdapat 5 (lima) butir pertanyaan yang tidak valid dan 1 (satu) butir pertanyaan valid. Jadi butir pertanyaan pada dimensi memberikan petunjuk dari variabel pembinaan yang dapat digunakan untuk analisa selanjutnya berjumlah 1 (satu) butir, sedangkan taraf signifikan yang digunakan 5 % dan n = 10.

Adapun butir-butir pertanyaan yang tidak valid, yaitu :

- a. Membuat petunjuk aturan atau ketentuan lain yang berkaitan dengan pengembangan Usaha UKM,

- b. Merumuskan rencana tujuan kelompok,
- c. Memiliki visi dan misi kelompok yang akan di capai.
- d. Mendatangkan tenaga profesional di bidang pemasaran hasil usaha untuk melatih pengelola usaha kearah lebih maju,
- e. Sistem kerja kelompok untuk pengembangan kelompok UKM.

Adapun penyebab tidak validnya jawaban dari pertanyaan butir dimensi memberikan petunjuk, yaitu responden kurang jelas dengan item pertanyaan, dan tidak pernah berbuat sebagaimana diharapkan.

#### **4.3.4 Mengarahkan**

Variabel pembinaan pada dimensi mengarahkan kepada pengelola usaha kelompok yang dilakukan oleh tim teknis tingkat kabupaten dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, merupakan salah satu bagian dari variabel pembinaan yang terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan. Tingkat validitas dan reliabilitas variabel Pembinaan dilakukan melalui pengujian. Lebih jelasnya hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Hasil uji validitas dimensi mengarahkan dari variabel Pembinaan tim teknis kabupaten, tahun 2008.

ITEM	r hitung	r tabel % 0,05 , n = 10	Keputusan
1	0,489	< 0,632	Tidak Valid
2	0,173	< 0,632	Tidak Valid
3	0,772	> 0,632	Valid
4	0,932	> 0,632	Valid
5	0,829	> 0,632	Valid

Sumber : Data primer hasil olahan.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 5 (lima) butir pertanyaan dari dimensi mengarahkan pada variabel pembinaan tim teknis, terdapat 2 (dua) butir pertanyaan yang tidak valid dan 3 (tiga) butir pertanyaan valid. Jadi butir pertanyaan pada dimensi mengarahkan dari variabel pembinaan yang dapat digunakan untuk analisa selanjutnya berjumlah 3 (tiga) butir, sedangkan taraf signifikan yang digunakan 5% dan n = 10. Adapun butir pertanyaan yang tidak valid, yaitu :

- a. Memberikan pengarahan kepada kelompok untuk melaksanakan kerja sesuai dengan ketentuan yang diharapkan,
- b. Memberikan pengarahan kepada kelompok agar bekerja dengan gairah dan memiliki inisiatif yang tinggi.

Adapun penyebab tidak validnya jawaban pertanyaan butir dimensi pengarahan, yaitu disebabkan pengarahan yang diberikan oleh tim teknis tidak mengarah pada peningkatan gairah kerja dan inisiatif kerja yang tinggi.

#### 4.4. Variabel Pengelola Usaha

Variabel pengelola usaha terdapat 3 ( tiga ) indikator, yaitu Bidang Administrasi, Bidang Produksi dan Bidang Pemasaran. Uji validitas menggunakan program SPSS 15.0, bertujuan untuk melihat tingkat validitas atau keabsahan variabel penelitian. Lebih jelasnya tingkat dilakukan uji validitas sebagai berikut :

##### 4.4.1 Bidang Administrasi

Sub variabel pengelolaan usaha pada dimensi Bidang Administrasi yang dilakukan oleh kelompok UKM di Kecamatan Tebing, memiliki 7 ( tujuh ) item pertanyaan terdiri dari 4 ( empat ) indikator. Tingkat validitas dan reliabilitas variabel pengelolaan usaha dilakukan melalui pengujian. Lebih jelasnya terhadap hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Hasil uji validitas dimensi Bidang Administrasi dari variabel pengelolaan Usaha tingkat Kecamatan Tebing, tahun 2008.

ITEM	r hitung	r tabel % 0,05 , n = 45	Keputusan
1	0,153	< 0,294	Tidak Valid
2	0,179	< 0,294	Tidak Valid
3	0,038	< 0,294	Tidak Valid
4	0,308	> 0,294	Valid
5	0,164	< 0,294	Tidak Valid
6	0,597	> 0,294	Valid
7	0,708	> 0,294	Valid

Sumber : Data primer hasil olahan.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dari 7 (tujuh ) item pertanyaan sub variabel Bidang Administrasi, terdapat 3 (tiga) item pertanyaan yang valid dan 4 (empat) butir pertanyaan tidak valid. Jadi butir pertanyaan pada dimensi Bidang Administrasi dari variabel pengelolaan usaha yang dapat digunakan untuk analisa selanjutnya berjumlah 3 (tiga) butir, sedangkan taraf signifikan yang digunakan 5 % dan  $n = 45$ . Adapun butir pertanyaan yang tidak valid, yaitu :

- a. Penunjukkan pengelola kelompok melalui hasil pemilihan,
- b. Keberadaan pengelola kelompok kelokasi kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
- c. Waktu pulang pengelola kelompok disesuaikan dengan waktu ditentukan,
- d. Menjaga dan merawat lingkungan tempat kerja agar suasana menjadi aman.

Adapun penyebab tidak validnya jawaban dari pertanyaan butir sub. variabel Bidang Administrasi, yaitu disebabkan pembinaan yang diberikan oleh tim teknis belum mengarah pada item pertanyaan.

#### **4.4.2. Bidang Produksi.**

Sub variabel pengelolaan usaha pada dimensi Bidang Produksi yang dilakukan oleh kelompok UKM di Kecamatan Tebing, memiliki 13 item pertanyaan terdiri dari 5 (lima) indikator. Tingkat validitas dan reliabilitas variabel Pengelolaan Usaha dilakukan melalui pengujian. Lebih jelasnya terhadap hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Hasil uji validitas dimensi Bidang Produksi dari variabel pengelolaan Usaha tingkat Kecamatan Tebing, tahun 2008.

ITEM	r hitung	r tabel % 0,05 , n = 45	Keputusan
1	0,157	< 0,294	Tidak Valid
2	0,345	> 0,294	Valid
3	0,189	< 0,294	Tidak Valid
4	0,540	> 0,294	Valid
5	0,490	> 0,294	Valid
6	0,349	> 0,294	Valid
7	0,022	< 0,294	Tidak Valid
8	0,078	< 0,294	Tidak Valid
9	0,359	> 0,294	Valid
10	0,835	> 0,294	Valid
11	0,598	> 0,294	Valid
12	0,826	> 0,294	Valid
13	0,727	> 0,294	Valid

Sumber : Data primer hasil olahan.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dari 13 item pertanyaan sub variabel Bidang Produksi, terdapat 9 (sembilan) item pertanyaan yang valid dan 4 (empat) butir pertanyaan tidak valid. Jadi butir pertanyaan pada dimensi Bidang Produksi dari variabel Pengelolaan Usaha yang dapat digunakan untuk analisa selanjutnya berjumlah 9 (sembilan) butir, Sedangkan taraf signifikan yang digunakan 5 % dan  $n = 45$ . Adapun butir pertanyaan yang tidak valid, yaitu :

- Pengelola usaha memiliki pemikiran yang sama dengan anggota kelompok,
- Pembinaan tentang pengembangan pembibitan dari tim teknis kepada kelompok pengelola usaha,
- Menjaga kebersihan tempat produksi agar hasil produksi dapat terjamin mutu,
- Mencatat hasil produksi yang dihasilkan.

Adapun penyebab tidak validnya jawaban dari pertanyaan butir sub variabel Bidang Produksi, juga disebabkan pembinaan yang diberikan oleh tim teknis belum mengarah pada item pertanyaan.

#### 4.4.3. Bidang Pemasaran.

Sub variabel pengelolaan usaha pada dimensi Bidang Produksi yang dilakukan oleh kelompok UKM di Kecamatan Tebing, memiliki 8 (delapan) item pertanyaan terdiri dari 4 (empat) indikator. Tingkat validitas dan reliabilitas variabel Pengelolaan Usaha dilakukan melalui pengujian. Lebih jelasnya terhadap hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Hasil uji validitas dimensi Bidang Pemasaran dari variabel pengelolaan Usaha tingkat Kecamatan Tebing, tahun 2008

ITEM	r hitung	r tabel % 0,05 , n = 45	Keputusan
1	0,399	> 0,294	Valid
2	0,016	< 0,294	Tidak Valid
3	0,577	> 0,294	Valid
4	0,101	< 0,294	Tidak Valid
5	0,382	> 0,294	Valid
6	0,182	< 0,294	Tidak Valid
7	0,384	> 0,294	Valid
8	0,435	> 0,294	Valid

Sumber : Data primer hasil olahan.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dari 8 (delapan) item pertanyaan sub variabel Bidang Pemasaran, terdapat 5 (lima) item pertanyaan yang valid dan 3 (tiga) item pertanyaan tidak valid. Jadi butir pertanyaan pada dimensi Bidang Pemasaran dari variabel Pengelolaan Usaha yang dapat digunakan untuk analisa

selanjutnya berjumlah 5 (lima) butir, Sedangkan taraf signifikan yang digunakan 5 % dan  $n = 45$ . Adapun butir pertanyaan yang tidak valid, yaitu :

- a. Pengelola usaha kelompok membaca peluang sebelum membuka usaha.
- b. Terpenuhinya pasar akan hasil usaha kelompok,
- c. Perbaiki sistem dan metode pemasaran yang telah ada,

Adapun penyebab tidak validnya jawaban dari pertanyaan butir sub variabel Bidang Produksi, juga disebabkan kurangnya perhatian kelompok terhadap permasalahan item pertanyaan.

#### 4.5 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pembinaan

Dari hasil jawaban kuesioner responden, selanjutnya data dikumpulkan sesuai dengan variabel Sub variabel dan indikator, yang dituangkan ke dalam tabulasi data. Hal ini bertujuan untuk mempermudah melihat tingkatan pembinaan tim teknis yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun, setiap butir pertanyaan memiliki rentang 1 sampai 5 dengan 38 item pertanyaan. Selanjutnya ditentukan interval dengan nilai tertinggi adalah 5 dan nilai terendah 1. Oleh karena itu, variabel pembinaan tim teknis dan pengelolaan usaha kelompok, dapat dinilai dikategorikan sebagai berikut :

Sangat Pernah	:	4,0 - 5,0
Pernah	:	3,0 - 3,9
Cukup pernah	:	2,0 - 2,9
Kurang pernah	:	1,0 - 1,9
Tidak pernah	:	0,1 - 0,9

Adapun rata-rata tertimbang dari variabel Pembinaan tim teknis dari 5 ( lima ) orang responden, dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Distribusi frekuensi skor pembinaan tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun,

Butir	Skor					Jumlah	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
1	0	0	0	3	2	22	4,4
2	1	0	0	4	0	15	3,4
3	3	1	0	1	0	9	1,8
4	2	0	3	0	0	11	2,2
5	1	2	2	0	0	15	3
6	1	2	2	0	0	11	2,2
7	1	1	2	1	0	13	2,6
8	2	0	1	2	0	13	2,6
9	3	0	2	0	0	9	1,8
10	1	1	2	1	0	13	2,6
11	1	1	1	2	0	14	2,8
12	3	0	1	1	0	10	2
13	0	1	1	3	0	17	3,4
14	2	0	1	2	0	13	2,6
15	2	0	2	1	0	12	2,4
16	1	1	0	3	0	15	3
17	1	1	1	2	0	14	2,8
18	1	1	3	0	0	12	2,4
19	0	1	2	2	0	16	3,2
20	1	0	2	2	0	15	3
21	2	0	2	1	0	12	2,4
22	3	0	2	0	0	9	1,8
23	4	0	1	0	0	7	1,4
24	3	0	2	0	0	9	1,8
25	3	1	0	1	0	9	1,8
26	2	2	0	1	0	10	2
27	2	0	2	1	0	12	2,4
28	2	0	0	3	0	14	2,8
29	1	0	2	2	0	15	3
30	1	0	3	1	0	14	2,8
31	0	1	3	1	0	15	3
32	1	1	2	1	0	13	2,6
33	0	5	0	0	0	10	2
34	1	0	1	3	0	16	3,2
35	0	0	1	4	0	19	3,8
36	0	0	4	0	1	17	3,4
37	0	1	3	0	1	16	3,2
38	0	4	1	0	0	11	2,2

Sumber : Hasil pengolahan data lapangan.

Berdasarkan tabel diatas, dari 38 item pertanyaan untuk variabel pembinaan tim teknis, terdapat 1 (satu) atau 2,6 % item pertanyaan yang menjawab sangat pernah, 12 atau 31,6 % item pertanyaan yang menjawab pernah, 19 atau 50 % item pertanyaan yang menjawab cukup pernah, 6 atau 15,8 % item pertanyaan yang menjawab kurang pernah dan yang menjawab tidak pernah nihil.

Untuk variabel pembinaan tim teknis pada sub variabel pembinaan melatih yang terdiri dari 17 item pertanyaan terdapat 10 atau 58,8 % responden yang menyatakan bahwa sub variabel pembinaan melatih cukup pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun masih terlihat belum optimal, karena pembinaan yang dilakukan hanya sebatas perencanaan usaha, pembibitan usaha dan penggunaan alat produksi. Sedangkan pembinaan yang mengarah pada pengendalian dan pengembangan usaha belum dilakukan, seperti pengorganisasian, pengendalian, teknis produksi (pembibitan), kurang mengikut sertakan kelompok dalam kegiatan pelatihan dan lokakarya yang diselenggarakan di luar tim teknis kabupaten.

Pada sub variabel pembinaan kecakapan dari 10 item pertanyaan masih terlihat 4 (empat) atau 40 % responden yang menyatakan bahwa pembinaan kecakapan kurang pernah dilakukan, disebabkan oleh pengelola kelompok selama menggunakan dana UKM kurang pernah memperoleh pembinaan dari tenaga profesional terutama dibidang pembuatan makanan ikan yang berkualitas, dibidang pemasaran, bidang pengelolaan usaha dan pengelolaan lahan usaha.

Dari sub variabel pemberian petunjuk, juga masih terlihat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis masih kurang, ini terbukti bahwa dari 6 (enam) item pertanyaan terdapat 4 atau 66,7 % responden menjawab masih kurang. Adapun dimensi yang masih dirasakan kurang dilakukan pembinaan yaitu tim pembinaan tingkat kabupaten. Dinas Perikanan dan Kelautan kurang membuat petunjuk atau ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha UKM, Kurang membantu kelompok dalam merumuskan rencana usaha, Tim teknis kurang memberikan petunjuk terhadap penyusunan tujuan yang akan dicapai oleh kelompok dan tim teknis kurang memberikan petunjuk kepada kelompok terhadap pengembangan usaha saat sekarang.

Untuk pembinaan yang bersifat pengarahan sudah dipandang efektif, karena dari 5 (lima) item pertanyaan terdapat 4 (empat) atau 80 % responden menyatakan bahwa pengarahan yang dilakukan oleh tim teknis kepada pengelola usaha kelompok berjalan secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak kegiatan pembinaan usaha yang harus dilakukan oleh tim teknis terhadap pengelola pengguna dana UKM, agar pengembangan usaha meningkat dan dana pinjaman UKM dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan diharapkan.

#### 4.6 Distribusi frekuensi skor variabel pengelolaan usaha kelompok

Dari hasil jawaban kuestioner responden, selanjutnya data dikumpulkan sesuai dengan variabel, Sub variabel dan indikator yang dituangkan kedalam tabulasi data. Hal ini bertujuan untuk mempermudah melihat tingkatan

pengelolaan usaha kelompok, setiap butir pertanyaan memiliki rentang 1 sampai 5 dengan 28 item pertanyaan. Selanjutnya ditentukan interval, dengan nilai tertinggi adalah 5 dan nilai terendah 1.

Oleh karena itu, variabel pengelolaan usaha kelompok dapat dikategorikan sebagai berikut :

Sangat Pernah	:	4,0	-	5,0
Pernah	:	3,0	-	3,9
Cukup pernah	:	2,0	-	2,9
Kurang pernah	:	1,0	-	1,9
Tidak pernah	:	0,1	-	0,9

Adapun rata-rata tertimbang dari variabel Pembinaan tim teknis dari 5 (lima) orang responden, dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini:

Tabel 17. Distribusi frekuensi skor pengelola Usaha Kelompok di Kecamatan Tebing.

Butir	Skor					Jumlah	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
1	0	0	0	6	3	39	4,3
2	0	0	1	4	4	39	4,3
3	1	0	1	5	4	36	4
4	0	0	1	5	3	38	4,2
5	0	1	0	4	4	38	4,2
6	0	0	2	5	2	36	4
7	0	0	1	7	1	36	4
8	0	0	1	6	2	33	3,6
9	5	1	0	3	0	19	2,1
10	3	1	0	4	1	26	2,8
11	8	0	1	0	0	11	1,2
12	2	2	0	4	1	27	3
13	1	1	1	5	1	31	3,4
14	0	0	0	7	1	38	4,2
15	1	0	2	5	1	32	3,5
16	2	0	3	5	1	27	3
17	5	0	0	4	0	21	2,3
18	7	0	1	1	0	14	1,5
19	5	1	0	3	0	19	2,1
20	6	0	0	3	0	18	2
21	7	2	0	0	0	11	1,2
22	1	0	0	7	1	34	3,7
23	0	2	2	5	0	30	3,3
24	5	2	1	1	0	16	1,7
25	2	1	4	1	1	25	2,7
26	4	0	0	4	1	25	2,7
27	3	2	0	4	0	23	2,5
28	2	3	0	3	1	25	2,7

Sumber : Hasil pengolahan data lapangan.

Berdasarkan tabel diatas, dari 7 (tujuh) item pertanyaan sub variabel Bidang Administrasi terdapat 100 % responden menyatakan bahwa pengelola usaha kelompok bekerja sesuai petunjuk secara administrasi. Sub variabel bidang produksi dari 13 item pertanyaan terdapat 10 atau 38,6 % responden menyatakan bahwa tim teknis pernah memberikan pembinaan tentang bidang produksi untuk peningkatan usaha kelompok, sedangkan untuk sub variabel Bidang Pemasaran dari 8 (delapan) item pertanyaan terdapat 6 atau 75 % responden menyatakan

bahwa tim teknis kabupaten mayoritas pernah melakukan pembinaan kepada pengelola usaha kelompok UKM tentang Bidang Produksi pengembangan usaha kelompok.

Bertitik tolak dari variabel pengelola usaha kelompok dan sub. variabel Bidang Administrasi, Produksi dan Bidang Pemasaran, terlihat bahwa prinsipnya tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan sudah melakukan pembinaan terhadap pengelola kelompok UKM tetapi masih belum terarah materi pembinaan yang di berikan kepada pengelola usaha kelompok UKM di Kecamatan Tebing. Bahwa variabel pembinaan tim teknis sangat memiliki peranan penting untuk menentukan keberhasilan kelompok dalam mengembangkan usaha yang menggunakan dana UKM. Kemampuan pengembalian pinjaman dana UKM kepada pemerintah melalui Bank dapat berjalan sebagaimana diharapkan, apabila kelompok terkoordinir dengan baik, usaha yang dilaksanakan memberikan hasil yang memadai dan tersedianya pasar yang mampu menampung hasil usaha.

Keberhasilan sistem pengembalian dana UKM tidak hanya disebabkan oleh hal tersebut diatas, tetapi juga sangat ditentukan oleh kerjasama anggota kelompok, adanya sistem tertib administrasi, sistem produksi dan sistem pemasaran yang terkendali. Untuk itu faktor pembinaan tim teknis sangat diperlukan sistem pengendalian produksi dan pasar.

Pengembalian dana UKM tidak hanya di ukur dari tingkat kesiapan kelompok melunasi dana pinjaman, tetapi diukur tingkat keberhasilan kelompok mengembangkan usahanya. Namun dari hasil pengamatan dilapangan bahwa dari sembilan kelompok yang ada hanya satu kelompok yang telah mengembalikan

pinjaman dana UKM, sebaliknya dilihat dari pengembangan usaha yang dikelola belum dapat berkembang sebagaimana harapan hal ini disebabkan oleh dari hasil produksi mereka hanya sebatas cukup untuk pengembalian pinjaman.

#### 4.7 Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pengumpulan data di lapangan melalui penyebaran kuestioner dan wawancara, diperoleh temuan temuan di dalam penelitian, diantaranya :

##### 4.7.1 Variabel Pembinaan Tim Teknis

Dari hasil analisis jawaban responden menunjukan bahwa variabel pembinaan yang dilaksanakan oleh tim teknis sudah dikategorikan cukup pernah, tetapi dari hasil pengamatan di lapangan masih terdapat permasalahan. Untuk lebih mempertajam dimensi yang ada dan sekaligus memperkaya ditemukan beberapa dimensi untuk menambah dan memperkayakan dimensi pembinaan yang telah ada, yaitu :

##### **4.7.1.1 Agenda Pembinaan.**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis tidak diawali dengan penyusunan skedul, sehingga pembinaan yang dilakukan belum optimal dan belum mampu menjawab permasalahan yang di hadapi oleh pengelola usaha kelompok .

Dengan tidak tersusunnya agenda pembinaan, mengakibatkan pengelola usaha berjalan apa adanya, sehingga permasalahan yang dihadapi kelompok tidak terpecahkan dan mengakibatkan kelompok mengalami kemacetan dalam mengembangkan usaha dan kelompok dalam mengangsurkan dana UKM mengalami kemacetan.

#### **4.7.1.2 Tenaga Teknis Pendamping Kelompok UKM.**

Dilihat dari kegagalan kelompok UKM dalam pengembalian dana UKM cukup tinggi, maka di indikasikan penyebab permasalahan tersebut disebabkan tidak tersedianya tenaga teknis pendamping. Seharusnya tenaga teknis pendamping sangat perlu diadakan, karena keberadaannya sangat membantu kelompok untuk mengatasi apabila timbulnya permasalahan kelompok dalam pengembangan usaha dan juga memotivasi kelompok untuk dapat mengali potensi dibidang usaha ke arah yang lebih maju, sehingga kelompok lebih berkembang.

Tersedianya tenaga teknis pendamping, diharapkan sekaligus penyediaan dana operasional pendamping, sehingga kerja pendamping dapat lebih optimal dan kelompok benar-benar terayomi dengan baik.

#### **4.7.1.3 Studi kelayakan usaha.**

Kegagalan usaha kelompok UKM baik dalam sistem pengembangan usaha disebabkan tim teknis dinas tidak melakukan secara optimal studi kelayakan usaha. Terlihat indikasi keberadaan kelompok hanya semata-mata keinginan

kelompok beserta anggota tetapi tidak diperhatikan oleh tim teknis dinas baik lokasi, jenis usaha dan pengetahuan SDM yang tersedia untuk pengolahan jenis usaha dimaksud.

Di samping itu penumbuhan kelompok UKM juga disebabkan mengejar target pemerintah setempat, tetapi bukan disebabkan skill yang dimiliki oleh kelompok. Seharusnya dana UKM yang diberikan kepada kelompok pemerintah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan usaha, baik jenis usaha yang akan dikembangkan maupun skill yang dimiliki oleh masing-masing kelompok maupun anggota kelompok.

Ketidakpahaman kelompok dan anggota kelompok membuat tingginya permasalahan yang muncul, tetapi apabila penetapan jenis usaha diawali dengan studi kelayakan, kemungkinan permasalahan yang muncul tetap teratasi oleh kelompok dan anggota kelompok, sehingga usaha kelompok dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

#### **4.7.1.4 Kerjasama Lintas Sektoral.**

Kegagalan kelompok pengguna dana UKM dari hasil pengamatan lapangan, juga disebabkan oleh kurangnya kerjasama lintas sektoral. Kegagalan kelompok UKM tidak hanya disebabkan karena kurangnya pembinaan dibidang teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan saja, tetapi diharapkan menjadi tanggung jawab tim lintas sektoral nantinya, karena kegagalan kelompok tersebut termasuk juga masalah kurangnya pembinaan dibidang sistem administrasi, pemasaran, motivasi, pengorganisasian dan masalah pembukuan.

Oleh karena itu apabila terwujudnya kerjasama lintas sektoral, maka permasalahan menjadi tanggung jawab lintas sektoral lain sesuai dengan bidang yang di tangganinya dan tidak terlalu menjadi permasalahan cukup besar dan akhirnya akan membawa kegagalan total dalam kelompok.

#### **4.8 PEMBAHASAN**

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, yang selama ini dipandang mengalami ketinggalan baik pembangunan maupun masih banyak masyarakat yang mengalami keterbelakangan ekonomi (kemiskinan). Untuk mengejar ketinggalan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan, pemerintah daerah melaksanakan program UKM sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat.

Untuk terlaksananya program tersebut pemerintah daerah menyediakan dana UKM dan dana tersebut akan di salurkan kepada kelompok, bertujuan agar dana tersebut dapat dijadikan modal usaha dalam melakukan pengembangan usaha kelompok. Dana yang di salurkan kepada kelompok sebagai modal awal dan dana tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah. Selama pelaksanaan program UKM dana yang disalurkan kepada kelompok mengalami kemacetan untuk dikembalikan kepada pemerintah.

Dengan kemacetan pengembalian dana UKM kepada pemerintah, maka pada pembahasan penelitian ini akan diteliti, hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan tim teknis dan pengelola usaha kelompok. Oleh karena itu dalam

pemecahan permasalahan ini kemacetan dalam pengembalian dana pinjaman UKM dapat dilihat secara jelas.

#### 4.8.1 Analisis Pembinaan Tim Teknis

Variabel pembinaan tim teknis diukur melalui 4 (empat) sub variabel. Pada sub variabel melatih memiliki 3 (tiga) indikator, sub. variabel memberikan kecakapan memiliki 2 (dua) indikator, sub. Variabel memberikan petunjuk memiliki 2 (dua) indikator dan mengarahkan memiliki 1 (satu) indikator.

Pada variabel ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pengelola kelompok usaha. Untuk itu pada pembahasan ini akan dibahas masing-masing sub variabel pembinaan, sebagai berikut :

##### 4.8.1.1 Pembinaan Melatih.

Pada sub variabel melatih yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun terhadap pengelola kelompok usaha digambarkan kedalam 3 (tiga) indikator yang terdiri dari 17 item pertanyaan. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang sub variabel melatih, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Hasil jawaban responden terhadap sub variabel Pembinaan Melatih.

SKOR JAWABAN RESPONDEN	RESPONDEN			RANGKING
	F	F x S	%	
1	25	25	11,2	3
2	11	22	9,8	4
3	21	63	28,1	2
4	26	104	46,4	1
5	2	10	4,5	5
	85	224	100	

Sumber : Diolah Peneliti, 2008.

Dari tabel diatas terdapat 28 atau 50,9 % skor jawaban responden menyatakan bahwa tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan pernah melatih pengelola usaha kelompok yang menggunakan dana UKM. Walaupun demikian, dilihat dari indikator peningkatan pengetahuan pengelola usaha kelompok masih dikategori kurang, karena pembinaan yang dilakukan masih relatif terbatas, baik dibidang pembukuan dan mengikutsertakan pengelola usaha kelompok pada lokakarya di luar daerah.

Untuk jenis pembinaan yang cukup pernah dilakukan oleh tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan kepada pengelola kelompok usaha dana UKM, yaitu menyusun rencana kelompok, membina organisasi kelompok, memberikan bantuan pembibitan, dan membina tentang penggunaan alat produksi.

Kegiatan melatih sering di gunakan pada semua bidang kegiatan dan setiap pengembangan organisasi, oleh karena itu secara umum Robinson ( Syarif Hidayat, 2001 : 44 ) mendefinisikan pelatihan sebagai suatu instruksi atau proses

pendidikan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Secara eksplisit mengindikasikan bahwa tujuan dasar dari pelatihan adalah untuk membangun atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu guna mencapai tingkat yang diinginkan. Juga dalam hal ini, menurut Maslow ( Hidayat, 2001 : 45 ) dalam teorinya yang di kenal sebagai *Needs of hierarchy* mengemukakan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu sangat dibutuhkan tidak saja untuk membekali yang bersangkutan dalam memulai atau mengembangkan aktivitas tertentu, tetapi juga dibutuhkan guna mencapai tingkat kepuasan atas hasil kerja yang telah dilakukan. Dengan permasalahan yang sama menurut Frederick Herzberg bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekerja melalui pelatihan sangat diperlukan tidak saja untuk meningkatkan produktivitas kerja, tetapi juga untuk mengurangi rasa tidak puas atas lingkungan kerja. ( Hidayat, 2001 : 45 )

Menurut Hasibuan ( 2001 : 76 ) bahwa latihan/traning diberikan kepada karyawan operasional. Latihan harus didasarkan kepada kebutuhan pekerjaan, yang tergantung kepada beberapa faktor yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang dan lain-lain. Namun jika dilihat indikator keberhasilan kelompok dari hasil data yang terkumpul, maka belum terlihat hasil pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis, sehingga hasil usaha kelompok belum berjalan secara maksimal, di samping itu juga di sebabkan materi yang diberikan oleh tim teknis kabupaten di pandang belum tepat sasaran. Menurut Robinson dalam Syarif Hidayat ( 2001 : 49 ) secara teoritis terdapat dua metoda utama dalam melaksanakan pelatihan yaitu *Didactic Method* dan

*Participative Method*. Aplikasi dari *Didactic Method* umumnya dilakukan dengan pola tutorial atau memberikan ceramah langsung di dalam kelas, sedangkan *Participative Method* lebih bersifat Role play, Diskusi Kelompok, Praktik Kelompok, Konferensi, Simulasi dan Studi Kasus. Di samping itu juga tim teknis dinas, hanya mampu melibatkan pengelola usaha pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di daerah, sedangkan pada kegiatan pelatihan di luar daerah tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah setempat untuk membiayai kegiatan pelatihan dimaksud.

#### 4.8.1.2 Pembinaan Kecakapan

Pada sub variabel kecakapan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun terhadap pengelola kelompok usaha digambarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang sub variabel kecakapan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Hasil jawaban responden terhadap sub variabel Pembinaan Kecakapan.

SKOR JAWABAN RESPONDEN	RESPONDEN			RANGKING
	F	F x S	%	
1	21	21	18,92	3
2	5	10	9,01	4
3	16	48	43,24	1
4	8	32	28,83	2
5	0	0	0	5
	50	111	100	

Sumber : Diolah Peneliti, 2008.

Dari tabel diatas terdapat 24 atau 72,07 % skor jawaban responden menyatakan bahwa tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan pernah memberi pembinaan kecakapan kepada pengelola usaha kelompok pengguna dana UKM, terutama yang berkaitan dengan kecakapan atau kejelian dalam melihat peluang yang ada.

Walaupun pembinaan kecakapan pernah dilakukan oleh tim teknis kepada pengelola usaha kelompok, namun masih terlihat bahwa pembinaan dimaksud masih mengalami kekurangan, karena agar kelompok UKM dapat berkembang dan menghasilkan produksi yang optimal, maka melatih pengelola usaha dibidang pembuatan makanan ikan, pemasaran hasil usaha, pengolahan usaha dan pengolahan lahan usaha seharusnya ada.

Dilihat dari indikator kepekaan pengelola usaha dalam pengembangan usahanya cukup pernah dilakukan pembinaan oleh tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan, namun pembinaan yang dilakukan juga masih kurang dirasakan oleh pengelola usaha pada indikator kemampuan dalam pengembangan usaha kelompok.

Selanjutnya menurut J. Famularo, dalam buku Handbook of Modern Personnel (Moekijat, 1988 : 39) Kebanyakan kegiatan pengembangan manajemen ( inventaris kecakapan, perencanaan tenaga kerja, perencanaan karier, latihan pokok persoalan, latihan hubungan manusiawi, dan lain-lain). Akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar berhubungan dengan perseorangan-pengembangan manajer. Pengembangan organisasi mencakup kegiatan-kegiatan ini, akan tetapi terutama memusatkan pada pengembangan kelompok kerja, dan

kemudian berusaha mengkaitkan semua sub kelompok dengan tujuan umum organisasi.

Faktor kecakapan seseorang dalam organisasi akan memberikan corak terhadap perkembangan produktivitas, karena semakin cakap seseorang, maka organisasi yang dikembangkan sebagai wadah dapat meningkatkan produktivitas kerja yang lebih efektif. Menurut Robert M. Ranfil dalam Makmur ( 2007 : 129 ) ada tujuh kunci untuk produktivitas yang tinggi, yaitu :

1. Keahlian manajemen yang bertanggung jawab,
2. Kepemimpinan yang luar biasa,
3. Kesederhanaan organisasi dan operasional,
4. Kepegawaian yang efektif,
5. Tugas yang menantang,
6. Perencanaan dan pengendalian umum,
7. Pelatihan yang manajerial khusus.

Di samping produktivitas untuk meningkat dan berkembangnya organisasi, juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas karena akan memberikan kualitas. Oleh karena itu kualitas memegang peranan yang sangat penting, sebab tujuan organisasi tanpa adanya kualitas akan menghasilkan kurang tidak efektif.

Menurut Tjiptono ( Makmur, 2007 : 130 ) terdapat tiga elemen kualitas, yaitu :

1. Kualitas meliputi usaha memnuhi atau melebihi harapan pelanggan,
2. Kualitas terhadap produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan,
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.

Kesemuanya ini, sangat tergantung pada kemampuan pengelola untuk mengembangkan kelompok, dan sejauhmana pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh tim teknis. Jika tim teknis belum optimal memberikan pembinaan kecakapan kepada pengelola, maka otomatis hasil yang diharapkan dari organisasi tidak dapat tercapai dengan baik. Dari hasil lapangan kegiatan yang bersifat pengembangan usaha masih belum berjalan secara optimal dan sistem pengelolaan masih bersifat tradisional, sehingga hasil yang dicapai kelompok masih dibawah standar diharapkan.

Tanpa adanya kecakapan pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan usaha, maka kelompok akan dihadapi kendala-kendala dalam pengembangan usaha. Untuk itu pembinaan kecakapan sangat di perlukan bagi pengelola usaha tenaga pendamping sebagai tenaga konsultan.

#### **4.8.1.3 Pemberian Petunjuk**

Pada sub variabel pemberian petunjuk yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun terhadap pengelola kelompok usaha digambarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang sub variabel pemberian petunjuk, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Hasil jawaban responden terhadap sub variabel Pemberian Petunjuk.

SKOR JAWABAN RESPONDEN	RESPONDEN			RANGKING
	F	F x S	%	
1	5	5	6,17%	4
2	7	14	17,28%	3
3	10	30	37,04%	2
4	8	32	39,51%	1
5	0	0	0	5
	30	81	100	

Sumber : Diolah Peneliti, 2008.

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pembinaan pemberian petunjuk oleh tim teknis, terdapat 62 atau 76,55 % menyatakan bahwa tim teknis dikategori pernah memberikan petunjuk kepada pengelola usaha. Adapun pembinaan petunjuk yang pernah dilakukan oleh tim teknis kepada pengelola usaha yaitu petunjuk tentang pengembangan usaha, membuat rencana pengembangan, perumusan rencana tujuan, membina penyusunan visi, misi organisasi dan mekanisme kerja dalam kelompok.

Namun jika diamati terlihat bahwa pengelola usaha dalam melakukan pengembangan kelompok hanya berdasarkan atas pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari tim teknis, disamping itu kemampuan pengelola usaha UKM masih di kategori rendah, karena pengelola UKM baru bekerja apabila digerakkan oleh tim teknis, sehingga kerja kelompok dan kemandirian kelompok belum tumbuh secara optimal.

Walaupun petunjuk penyusunan visi dan misi atau tujuan yang diharapkan sudah di bentuk oleh kelompok UKM, tetapi visi, misi yang dirumuskan tidak terlihat kegiatan kearah perubahan. Setiap perubahan diawali oleh cara berpikir yang berbeda (*a new mindset*) dan cara pandang yang berbeda atau yang baru (*a new point of view*). Oleh karena itu visi memberikan petunjuk tentang arah perubahan. Visi untuk berubah memberikan sinyal-sinyal bagi setiap anggota organisasi untuk menentukan tingkat keterlibatan masing-masing dalam rencana transformasi atau perubahan yang akan dilaksanakan (Ismawan, 2007 : 18). Adapun faktor penyebab hal tersebut yaitu kerja kelompok belum nampak secara optimal, penyusunan usaha kurang diawali dari proses perencanaan, jenis usaha yang dipilih kurang menjawab tantangan pasar dan rendahnya tingkat pendidikan pengelola/ anggota kelompok.

Petunjuk yang disusun oleh tim teknis untuk pengelola kelompok hanya berupa diktat bukan dalam bentuk buku dan materinya lebih menitik beratkan pada teori pengembangan usaha dan hasil pengalaman kelompok terdahulu, hal ini hanya bersifat pedoman yang harus dilakukan oleh kelompok. Sejalan dengan hal tersebut, Sinamon dan Santoso (2002 : 95 – 96) menyatakan sebagai berikut dalam perspektif masa depan, seorang pemimpin berperan sebagai pemberi petunjuk (pemandu jalan) bagi konsistennya. Ia harus mampu mempunyai visi, tujuan dan saran bagi petunjuk yang jelas menuju masa depan”.

Dengan adanya buku-buku petunjuk dan pemahaman terhadap visi yang ada maka pengelola usaha akan lebih mudah dalam pengembangan usahanya. Selanjutnya dengan adanya buku petunjuk dari tim teknis dalam pengelolaan

usaha kepada pengelola usaha maka apa yang diharapkan dalam pengembangan usaha bagi pengelola usaha dan tujuan program UKM dapat dicapai.

#### 4.8.1.4 Mengarahkan

Pada sub. variabel mengarahkan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun terhadap pengelola kelompok usaha digambarkan kedalam 1 ( satu ) indikator yang terdiri dari 5 ( lima ) item pertanyaan. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang sub variabel mengarahkan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21. Hasil jawaban responden terhadap sub variabel Mengarahkan.

SKOR JAWABAN RESPONDEN	RESPONDEN			RANGKING
	F	F x S	%	
1	1	5	6,02%	4
2	5	10	12,05%	3
3	10	30	36,14%	2
4	7	28	33,74%	1
5	2	10	12,05%	3
	25	83	100	

Sumber : Diolah Peneliti, 2008.

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang sub variabel pengarahan, terdapat 38 atau 45,79 % menyatakan tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun di kategori pernah memberikan pengarahan kepada pengelola kelompok UKM. Adapun pengarahan yang pernah diberikan oleh tim teknis yaitu

melaksanakan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja dengan gairah dan inisiatif sendiri.

Realisasinya pengarahan yang telah diberikan oleh tim teknis cukup dipahami oleh pengelola kelompok, namun kelompok sangat sulit dilaksanakan, sehingga usaha kelompok mengalami kegagalan dan punah. Adapun dari hasil pengamatan, faktor penyebab timbulnya kegagalan tersebut yaitu rendahnya teknologi yang digunakan oleh kelompok, pengetahuan dan keterampilan pengelola kelompok tentang budidaya perikanan darat masih rendah. Di samping itu juga sistem penanganan masalah belum dipelajari oleh kelompok secara optimal, sehingga dihadapi masalah di dalam kelompok sulit untuk dilakukan pencegahan.

Menurut Siswanto ( 2007 : 111 ) pengarahan /mengarahkan berarti menentukan bagi bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Maka sebagai pembina tim teknis kabupaten Dinas Kelautan dan Perikanan harus mengarahkan pengelola usaha agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelola usaha.

Adapun tujuan dari pada mengarahkan yaitu untuk menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan pengarahan dilakukan untuk menjamin kelangsungan perencanaan, artinya perencanaan yang telah ditetapkan meskipun memiliki sifat fleksibel namun prinsip yang terkandung didalamnya harus tetap dijamin kontinuitasnya.

Berkaitan dengan pengarahan baru dapat lebih efektif, apabila pihak yang memberikan pengarahan harus paham terhadap pengarahan yang diberikan,

baik yang bersifat substansi materi pengarahan maupun sasaran yang dilakukan pembinaan. Hal ini bertujuan supaya pengarahan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Proses dan tatacara dalam memberikan pengarahan terhadap kelompok juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, semakin baik lingkungan yang tersedia maka pengarahan yang diberikan akan lebih optimal dan tepat sasaran diharapkan. Oleh karena itu di dalam melaksanakan pembinaan tim teknis terhadap pengelola usaha untuk lebih terarahnya pengelolaan usaha harus diberikan arahan yang tepat agar pelaksanaan program UKM yang bertujuan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan usaha perikanan darat dapat tercapai dengan baik.

#### **4.8.2 Analisis Pengelolaan Usaha**

Pada variabel pengelola usaha diukur melalui 3 (tiga) sub variabel. Pada sub variabel Bidang Administrasi memiliki 4 (empat) indikator, sub variabel Bidang Produksi memiliki 5 (lima) indikator, dan sub variabel Bidang Pemasaran memiliki 4 (empat) indikator.

Pada variabel ini akan dilihat bagaimana sistem pengelolaan kelompok yang dilakukan untuk meningkatkan jenis usaha, karena keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh benar atau tidaknya sistem pengelola yang dilakukan, baik metode, alat yang digunakan maupun sistem manajemen dan administrasi yang digunakan untuk membuat organisasi menjadi lebih baik. Untuk itu pada pembahasan ini akan dibahas masing-masing sub variabel pengelolaan usaha sebagai berikut :

#### 4.8.2.1. Bidang Administrasi

Pada sub variabel administrasi yang dilakukan oleh pengelola usaha pada pengguna dana UKM digambarkan kedalam 4 ( empat ) indikator yang terdiri dari 7 ( tujuh ) item pertanyaan. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang sub variabel Bidang Administrasi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Hasil jawaban responden terhadap sub variabel Bidang Administrasi.

SKOR JAWABAN RESPONDEN	RESPONDEN			RANGKING
	F	F x S	%	
1	1	1	0,37	4
2	1	1	0,37	4
3	6	18	6,69	3
4	36	144	53,53	1
5	21	105	39,03	2
	65	269	100	

Sumber : Diolah Peneliti, 2008.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat 249 atau 92,56 % skor pertanyaan responden yang menyatakan bahwa pengelola kelompok UKM pernah melakukan Bidang Administrasi. Secara administrasi yang pernah dilakukan oleh kelompok yaitu pemilihan pengelola kelompok, kedatangan pengelola kelompok di tempat usaha, kehadiran dan pulang pengelola kelompok tepat waktu, mengisi waktu luang yang menyangkut peningkatan produksi, menjaga dan merawat lingkungan tempat kerja dan perbaikan lingkungan kerja

Di sisi lain, sarana bidang administrasi kelompok yang mengarah pada pencatatan dan pelaporan, seperti buku tamu, buku saran dan solusi

pengembangan kelompok, buku hasil usaha, buku kunjungan tim teknis, buku keuangan dan laporan keuangan mayoritas di masing-masing kelompok tidak ada.

Bagaimanapun sarana bidang administrasi sebagai penentu terhadap keberhasilan organisasi, meskipun organisasi berjalan secara optimal tetapi tidak diimbangi dengan rapinya system administrasi, maka keberhasilan kelompok masih sangat diragukan. Oleh karena itu sarana administrasi sangat perlu di adakan, di samping untuk melihat keberhasilan organisasi, di sisi lain sebagai alat control kearah mana organisasi ini berada dan sejauhmana keberhasilan yang sudah dicapai oleh organisasi. Menurut Peter M. Senge dalam konsep organisasi pembelajaran terdapat lima komponen Learning Organization, yaitu Keahlian pribadi, Model mental, Visi bersama, Pembelajaran oleh tim dan berpikir sistemik. Kelima kompetensi tersebut apabila tidak dilaksanakan secara seimbang dan disiplin, maka organisasi tidak dapat berjalan secara optimal dan harmonis. (Ismawan, 2007 : 92 )

Sehubungan hal tersebut, apabila sistem administrasi kelompok tidak berjalan sebagaimana diharapkan, mengakibatkan rencana dan pelaksanaan penggunaan pinjaman dana yang dilakukan tidak optimal, sehingga usaha yang akan dilaksanakan mengalami kegagalan.

#### **4.8.2.2 Bidang Produksi**

Pada sub variabel produksi yang dilakukan oleh pengelola usaha pengguna dana UKM digambarkan ke dalam 5 (lima) indikator yang terdiri dari

13 item pertanyaan. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang sub variabel produksi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Hasil jawaban responden terhadap sub variabel Bidang Produksi.

SKOR JAWABAN RESPONDEN	RESPONDEN			RANGKING
	F	F x S	%	
1	45	45	14,06	2
2	6	12	3,75	5
3	9	27	8,44	4
4	49	196	61,25	1
5	8	40	12,5	3
	25	320	100	

Sumber : Diolah Peneliti, 2008.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat 236 atau 73,75 % skor jawaban responden yang menyatakan bahwa pengelola kelompok UKM pernah melakukan produksi. Bidang produksi yang pernah dilakukan oleh kelompok yaitu pemilihan lahan produksi, pengembangan pembibitan, penjadwalan rutin dalam pelaksanaan produksi, mencatatkan hasil produksi, mengikuti petunjuk dalam produksi dan pengolahan makanan ikan. Di sisi lain, pelaksanaan bidang produksi pada pengelolaan usaha kelompok yang mengarah pada pengembangan pembibitan ikan, menyikapi kegagalan produksi belum dapat dilaksanakan sebagaimana harapan.

Sehubungan hal tersebut, apabila sistem produksi dan pengembangan pembibitan sesuai dengan penjadwalan sebagaimana diharapkan, maka hasil produksi diperoleh sesuai dengan diharapkan. Sebaliknya apabila rencana

kegiatan produksi berjalan tidak lancar, jadwal panen usaha tidak sesuai dengan waktu ditentukan, maka akan mengakibatkan kegagalan panen usaha.

Di samping itu dari hasil observasi lapangan masih banyak ditemukan kegagalan dalam pengembangan pembibitan, sehingga masa panen produksi tidak dapat dijadwalkan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemeliharaan benih yang baru menetas dan terjadinya kematian anak ikan yang baru menetas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh David (1976 :3-4) sebagai berikut : *Productivity is the quotient obtained by dividing output by one of the factors of production. Productivity is concerned with the efficient utilization of resources (input) in producing goods and/or service (output)* yang artinya bahwa produktivitas menunjukkan hasil bagi antara output dengan faktor-faktor produksi (manusia, metoda, teknologi, mesin, market) dan sebagainya.

#### **4.8.2.3 Bidang Pemasaran**

Pada sub variabel pemasaran yang dilakukan oleh pengelola usaha pengguna dana UKM digambarkan kedalam 4 (empat) indikator yang terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan . Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang sub variabel pemasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Hasil jawaban responden terhadap sub variabel Bidang Pemasaran.

SKOR JAWABAN RESPONDEN	RESPONDEN			RANGKING
	F	F x S	%	
1	24	24	7,38	3
2	12	24	7,38	4
3	7	21	6,46	5
4	24	96	29,54	2
5	4	160	49,24	1
	71	325	100	

Sumber : Diolah Peneliti, 2008.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat 256 atau 78,76 % skor jawaban responden yang menyatakan bahwa pengelola kelompok UKM pernah melakukan pemasaran. Adapun kegiatan di bidang pemasaran yang pernah dilakukan oleh kelompok yaitu pemasaran hasil produksi, membaca peluang pasar usaha, kepuasan pada pelanggan terhadap hasil produksi, menciptakan harga bervariasi pada, memperbaiki saluran pemasaran, menekan biaya pemasaran dengan harga pasaran yang sama. Menurut Wahyu Saidi ( 2006 : 2 ) Pemasaran tidak hanya mencakup pemasaran produk berupa barang tetapi juga termasuk jasa di dalamnya. Memasarkan barang dan jasa tidak berarti hanya menawarkan barang dan jasa atau sekedar menjual tetapi lebih luas dari itu, termasuk membeli menjual dengan segala macam cara, menyangkut barang jasa, menyimpan, dan menyortir.

Selanjutnya menurut Wahyu Saidi ( 2006 : 3 ) pemasaran berawal dari langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen yang belum terpuaskan atas barang dan jasa yang diinginkan,
2. Membuat perkiraan mengenai berapa jumlah konsumen yang belum terpuaskan kebutuhan dan keinginan,
3. Melakukan pengembangan atas produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut,
4. Menentukan tingkat harga dan persyaratan yang dirasa wajar bagi para konsumen, di samping dapat menghasilkan keuntungan yang wajar bagi perusahaan,
5. Memilih dan menentukan secara tepat sistem saluran distribusi agar barang dan jasa yang dihasilkan mudah di dapat oleh para konsumen sasaran,
6. Menentukan cara-cara promosi, media yang digunakan dan bagaimana seharusnya media-media itu di pakai untuk menginformasikan keberadaan barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka menarik minat konsumen yang setuju,
7. Melakukan kegiatan penjualan ( artinya setelah barang selesai dibuat, diberi harga dan ditentukan saluran distribusi dan promosinya ) serta berbagai kegiatan atau layanan purna jual.

Di samping itu juga pembinaan tim teknis pada bidang pemasaran masih dirasakan oleh pengelola kelompok masih kurang, sehingga jadwal panen tidak dapat dipasarkan secara maksimal dan mengakibatkan kerugian terutama pada penyediaan makanan atau pelet ikan. Di sisi lain, pelaksanaan bidang pemasaran pada pengelolaan usaha kelompok yang mengarah pada jangkauan pasar yang

lebih jauh dan memenuhi permintaan pasar belum dapat terpenuhi oleh pengelola usaha, sementara permintaan pasar terhadap hasil produksi cukup menjanjikan.

Selanjutnya dari hasil observasi lapangan pemasaran hasil usaha cukup baik namun tidak dapat memenuhi permintaan pasar, sehingga mempengaruhi harga jual yang cukup bervariasi. Walaupun harga cukup bervariasi belum dapat menguntungkan pengelola usaha, ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengelola usaha dalam pengembangan pembibitan sehingga jadwal panen tidak dapat ditentukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pengolahan data yang dilakukan dengan cara statistik untuk melihat pengaruh pembinaan tim teknis terhadap pengelolaan usaha dalam pengembalian pinjaman dana UKM di Kecamatan Tebing, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil pengolahan data, Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai tim teknis telah melakukan pembinaan terhadap pengelola usaha kelompok UKM, seperti penyusunan rencana kelompok, membina organisasi kelompok, memberikan bantuan pembibitan ikan dan membina tentang penggunaan alat produksi, tetapi hasil yang diperoleh belum optimal sebagaimana diharapkan. Pembinaan dibidang pembukuan dan mengikutsertakan pengelola pada lokakarya di luar daerah belum dilakukan oleh tim teknis kepada pengelola kelompok.

Pembinaan di bidang kecakapan yang mengarah pada kepekaan, mengembangkan usaha, pengetahuan dan keterampilan cukup pernah dilakukan oleh tim teknis, namun pembinaan yang dilakukan masih belum optimal, karena sistem pengelolaan masih bersifat tradisional.

Pembinaan di bidang pemberian petunjuk juga pernah dilakukan oleh tim teknis, seperti petunjuk pengembangan usaha, membuat rencana pengembangan, perumusan rencana tujuan, penyusunan visi dan misi

organisasi dan mekanisme kerja dalam kelompok. Namun pengembangan kelompok hanya berdasarkan pengetahuan dan keterampilan tim teknis, sedangkan petunjuk yang diberikan tidak terlihat kearah perubahan pengembangan organisasi.

Sedangkan pembinaan yang bersifat memberikan pengarahan juga telah dilakukan oleh tim teknis kepada pengelola usaha kelompok yang bersifat melaksanakan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja dengan gairah dan inisiatif tinggi, namun kenyataannya kelompok sangat sulit untuk melaksanakan.

- 1.2. Bahwa dari hasil pengolahan data, pengelolaan usaha kelompok pengguna dana UKM telah mengatur hal-hal dibidang administrasi meliputi sistem tata cara pemilihan pengelola kelompok, keberadaan pengelola kelompok di tempat usaha, jadwal kehadiran dan pulang pengelola kelompok, meningkatkan waktu luang untuk peningkatan produksi, menjaga dan merawat lingkungan tempat kerja dan perbaikan lingkungan tempat kerja. Namun demikian disisi lain pencatatan dan pelaporan kelompok seperti penyediaan buku tamu, buku saran dan solusi pengembangan kelompok, buku hasil usaha, buku kunjungan tim teknis, buku keuangan dan laporan keuangan justru tidak ada tersedia dan diabaikan.

Pada bidang produksi, seperti pengembangan pembibitan ikan, menyikapi kegagalan produksi dan jadwal panen tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini lah yang mengakibatkan kegagalan panen usaha.

Sedangkan di bidang pemasaran, seperti pemasaran hasil produksi, membaca peluang pasar usaha, menjaga kepuasan pelanggan terhadap hasil produksi, menciptakan harga bervariasi, memperbaiki saluran pasar, menekan biaya pemasaran dengan harga pasaran yang sama. Namun di sisi lain bidang pemasaran masih kurang terutama jadwal panen tidak sesuai dengan diharapkan, belum mampu memenuhi permintaan pasar, sementara permintaan pasar akan produksi cukup menjanjikan, maka dengan permasalahan tersebut mengakibatkan kegagalan kelompok usaha.

- 1.3. Bahwa pembinaan tim teknis terhadap pengelola usaha dana UKM cukup tinggi, karena fungsi pembinaan tim teknis memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan kelompok dalam mengembangkan usaha dengan menggunakan dana UKM. Keberhasilan pengelolaan kelompok usaha, juga dipengaruhi oleh kerjasama anggota kelompok, adanya sistem tertib administrasi, sistem produksi dan sistem pemasaran yang terkendali.

Namun dilihat dari hasil laporan bulan yang di terima Kecamatan dari Bank Riau cabang Tanjung Balai Karimun sebagai penyalur dana kepada kelompok dilihat masih banyaknya penungakan terhadap pengembalian dana pinjaman UKM. Ternyata kemampuan pengelola usaha dalam pengembalian pinjaman UKM masih rendah, ini menunjukkan bahwa kemacetan jenis usaha tidak hanya disebabkan pembinaan teknis tetapi diukur dari tingkat keberhasilan pengelola usaha dalam mengembangkan usahanya.

## 5. 2. SARAN

### 5.2. 1. Saran bagi Aspek Keilmuan

Dengan selesainya penelitian ini, di harapkan kepada para akademik agar supaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan berbagai kegiatan pembinaan tim teknis yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Disamping itu juga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan konsep/teori tentang pembinaan dan sistem pengelolaan kelompok usaha bagi pengguna dana UKM di Kecamatan Tebing.

### 5.2.2. Saran bagi Aspek Praktis

#### 5.2.2.1 Pembinaan Tim Teknis

5.2.2.1.1 Untuk meningkatkan SDM tenaga pembina pengelola usaha kelompok UKM, maka sangat di pandang perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan tim teknis, karena kedepan keberhasilan tenaga pengelola usaha kelompok UKM berada di tangan pembina selaku tim teknis kabupaten.

5.2.2.1.2 Supaya pengelola usaha dapat meningkatkan gairah kerja dan inisiatif yang tinggi, tidak seharusnya pembinaan yang diberikan oleh pembina hal-hal yang bersifat rumit, sehingga mengakibatkan sulit untuk melaksanakan.

5.2.2.1.3 Agar kegiatan pengelola usaha dapat menghasilkan yang lebih optimal, maka perlu di susun jadwal agenda pembinaan, sehingga pembinaan yang diberikan kepada pengelola usaha kelompok UKM lebih terarah dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

5.2.2.1.4 Agar supaya pengelola usaha dana UKM mendapat perhatian khusus dalam mengembangkan jenis usaha, sehingga permasalahan kelompok dapat diatasi, maka sangat perlu di bentuk Tenaga Teknis Pendamping Kelompok UKM untuk masing-masing kelompok.

#### **5.2.2.2 Pengelolaan Usaha**

5.2.2.2.1 Untuk lebih jelas dan terarah pembinaan yang diberikan oleh tim teknis kepada pengelola kelompok, maka sangat perlu penyediaan buku tamu, buku saran dan solusi pengembangan kelompok, buku hasil usaha, buku kunjungan tim teknis, buku keuangan dan laporan keuangan, sehingga aktivitas dan kemajuan kelompok mudah dipantau.

5.2.2.2.2 Agar supaya hasil produksi dapat dinikmati oleh permintaan , maka sangat perlu pengelola usaha dengan memperhatikan jadwal panen, sehingga hasil panen mampu memenuhi permintaan pasar.

5.2.2.2.3 Agar supaya jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh kelompok pengguna dana UKM lebih terarah, maka diharuskan tim teknis kabupaten atau tenaga pendamping kelompok harus benar-benar melakukan studi kelayakan usaha kepada pengelola usaha, sehingga

penentuan jenis usaha tepat sasaran dan hasil yang akan di capai lebih memuaskan.

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR PUSTAKA**

- As'ad, Mohammad. 1981. *Psikologi Industri*, Jakarta : Liberty.
- Fasli dan Supriadi. 2001 . *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks otonomi Daerah*, Jakarta : Adicita.
- Gomes, Faustio Cardoso. 1997. *Manajemen Sumber Daya manusia*, Yogyakarta : Ansi offiset.
- Hanif , Nurcholis. 1999. *Pemerintah daerah*, Jakarta : Pusat Universitas Terbuka.
- Hasibuan, S.P. 2005. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ismawan, Indra. 2007. *Membangun Organisasi Pembelajaran*, Yogyakarta : Cakrawala.
- Kartomo,Wirosuharjo. 1981. *Dasar-dasar Demografi*, Jakarta : Lembaga Demografi.
- Kerlinger Fred N dan Pedhazur, J. 1973, Pent. A. Taufik, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Bandung : Nur Cahaya.
- Makmur, Syarif. 2007. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Aktivitas Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Nasir. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha,Talizidulu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Prasetyo, Irawan. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Prawira budi,Triton. 2007. *Panduan Sikap dan Prilaku Etrepreneurship*, Yogyakarta : Tugu Publisher.
- Saidi, Wahyu. 2006. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Iqrograf.
- Singarimbun, M dan Efendi Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : LP3ES.

- Sinungan. 2005. *Produktivitas apa dan bagaimana*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Siswanto, HB. 2007. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soedijarto. 1993. *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Soehidjo, Notoatmojo. 1988. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sopiah. 2008, *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Syarif Hidayat dan Syamsul bahri. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta : PT. Pustaka Quantum.
- Tilaar, H A.R. 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1986. *Manajemen Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi, 1990. *Ilmu Ekonomi dan Aspek-Aspek Metodologisnya*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Wrihatnolo, Randy R. 2002. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta : PT. Gramedia.
- , 1999, *Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, *Tentang Usaha Kecil*, 2007,
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, *Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*, 2007.
- Surat Keputusan Bupati karimun Nomor 62 tahun 2002 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal dari APBD Karimun*.

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
No.1	95.40	691.300	.906	.954
No.2	96.40	716.800	-.013	.959
No.3	98.00	663.500	.782	.953
No.4	97.60	715.300	.020	.958
No.5	96.80	659.700	.898	.952
No.6	97.60	675.300	.959	.953
No.7	97.20	671.700	.756	.953
No.8	97.20	641.700	.959	.952
No.9	98.00	696.500	.346	.956
No.10	97.20	670.700	.774	.953
No.11	97.00	659.000	.851	.953
No.12	97.80	651.700	.886	.952
No.13	96.40	698.800	.383	.956
No.14	97.20	641.700	.959	.952
No.15	97.40	653.300	.913	.952
No.16	96.80	651.700	.886	.952
No.17	97.00	650.500	.985	.952
No.18	97.40	731.300	-.298	.959
No.19	96.60	682.300	.794	.954
No.20	96.80	659.700	.898	.952
No.21	97.40	653.300	.913	.952
No.22	98.00	696.500	.346	.956
No.23	98.40	694.300	.479	.955
No.24	98.00	696.500	.346	.956
No.25	98.00	663.500	.782	.953
No.26	97.80	664.200	.824	.953
No.27	97.40	653.300	.913	.952
No.28	97.00	689.500	.296	.957
No.29	96.80	752.700	-.543	.962
No.30	97.00	671.500	.793	.953
No.31	96.80	715.700	.040	.957
No.32	97.20	683.700	.548	.955
No.33	97.80	717.700	.000	.956
No.34	96.60	669.300	.692	.954
No.35	96.00	717.000	.021	.957
No.36	96.40	689.300	.588	.955
No.37	96.60	673.300	.760	.953
No.38	97.60	703.300	.599	.955

UNIVERSITAS TERBUKA

#### DAFTAR PUSTAKA

Fasli dan Supriadi. 2001 . *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks otonomi Daerah* Jakarta : Adicita.

Gomes, Faustio Cardoso. 1997. *Manajemen Sumber Daya manusia*, Yogyakarta :  
Ansi offiset.

Hanif , Nurcholis. 1999. *Pemerintah daerah*, Jakarta : Pusat Universitas Terbuka.

Hasibuan, S.P, 2005. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*,  
Jakarta : PT. Bumi Aksara.

- H. A.R Tilaar, 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Irawan Prasetyo, 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Kerlinger Fred N dan Pedhazur, J. 1973, Pent. A. Taufik, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Bandung : Nur Cahaya.
- Mohammad As'ad, 1981. *Psikologi Industri*, Jakarta : Liberty.
- Nasir Muhammad, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Notoatmojo Soehidjo, 1988. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Randy R. Wrihatnolo, 2002. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Singarimbun, M dan Efendi Sofian, 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Syarif Hidayat dan Syamsul bahri, 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta : PT. Pustaka Quantum.
- Soedijarto, 1993. *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Syarif Makmur, 2007. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Aktivitas Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sinungan, 2005. *Produktivitas apa dan bagaimana*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siswanto, HB, 2007. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1986. *Manajemen Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.

Talizidulu Ndraha, 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wirosuharjo Kartomo, 1981. *Dasar-dasar Demografi*, Jakarta : Lembaga Demografi,

-----, 1999, *Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Winardi, 1990. *Ilmu Ekonomi dan Aspek-Aspek Metodologisnya*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, *Tentang Usaha Kecil*, 2007,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, *Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*, 2007.

Surat Keputusan Bupati karimun Nomor 62 tahun 2002 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal dari APBD Karimun*.

### 3. PENGARUH PEMBINAAN TIM TEKNIS KABUPATEN TERHADAP PENGELOLAAN USAHA DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN UKM.

Untuk melihat tingkat dan keeratan Pengaruh Pembinaan Tim Teknis Kabupaten ( X ) terhadap Pengelolaan Usaha Dalam Pengembalian

Pinjaman UKM ( Y ), maka digunakan analisis korelasi dengan program SPSS 15.0, sehingga memperoleh output sebagai berikut :

Tabel 25. Uji korelasi Bivariate antara Variabel Pembinaan dengan Pengelolaan Usaha.

**Correlations**

		Pembinaan	PengelolaanUsaha
Pembinaan	Pearson Correlation	1	.168
	Sig. (2-tailed)		.394
	N	38	28
PengelolaanUsaha	Pearson Correlation	.168	1
	Sig. (2-tailed)	.394	
	N	28	28

Sumber : Data Olahan Tahun 2008.

Berdasarkan hasil olahan data variabel X ( Pembinaan Tim Teknis ) dan variabel Y ( Pengelolaan Usaha ), diketahui bahwa angka output dari hasil olahan statistik, maka angka nilai  $r = 0,168$ . Angka ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara variabel pembinaan terhadap variabel pengelolaan usaha dapat diabaikan karena nilai  $r$  mendekati 0 atau nilai  $r < 0,2$  baik positif maupun negatif, hubungan dapat

pembinaan tim teknis sangat diperlukan sistem pengendalian produksi dan pasar.

Untuk melihat besarnya pengaruh pembinaan tim teknis terhadap Pengelolaan Usaha, maka dilakukan analisa statistik dengan menggunakan

program SPSS Regresi Linear. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 26. Besarnya pengaruh variabel pembinaan tim teknis terhadap pengelola usaha dalam pengembalian dana UKM.

**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.227(a)	.051	.015	8.755	1.005

a Predictors: (Constant), Pembinaan

b Dependent Variable: Pengelolaan

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai R square sebesar 0,051 yang berasal dari mengkuadratkan nilai koefisien korelasi  $0,227 \times 0,227 = 0,051$  dalam hal ini berarti 5,1 % pengelolaan usaha dapat digerakkan melalui pembinaan tim teknis yang meliputi sub variabel melatih kecakapan, petunjuk dan mengarahkan sedangkan sisanya 94,9 % menunjukkan bahwa kemacetan sistem pengembalian dana UKM tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pembinaan akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Keberhasilan kelompok dalam pengembalian dana UKM tidak hanya di ukur dari tingkat kesiapan kelompok melunasi dana pinjaman, tetapi diukur tingkat keberhasilan kelompok mengembangkan usahanya. Namun dari hasil pengamatan dilapangan bahwa dari sembilan kelompok yang ada hanya satu kelompok yang telah mengembalikan pinjaman dana UKM, sebaliknya dilihat dari pengembangan usaha yang dikelola belum

dapat berkembang sebagaimana harapan hal ini disebabkan oleh dari hasil produksi mereka hanya sebatas cukup untuk pengembalian pinjaman.

UNIVERSITAS TERBUKA

## 2. PEMBAHASAN

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, yang selama ini dipandang mengalami

ketinggalan baik pembangunan maupun masih banyak masyarakat yang mengalami keterbelakangan ekonomi ( Kemiskinan ). Untuk mengejar ketinggalan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan, pemerintah daerah melaksanakan Program UKM sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat.

Untuk terlaksananya program tersebut pemerintah daerah menyediakan dana UKM dan dana tersebut akan di salurkan kepada kelompok, bertujuan agar dana tersebut dapat dijadikan modal usaha dalam melakukan pengembangan usaha kelompok. Dana yang di salurkan kepada kelompok sebagai modal awal dan dana tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah. Selama pelaksanaan program UKM dana yang disalurkan kepada kelompok mengalami kemacetan untuk dikembalikan kepada pemerintah.

Dengan kemacetan pengembalian dana UKM kepada pemerintah, maka pada pembahasan penelitian ini akan diteliti, hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan tim teknis dan pengelola usaha kelompok. Oleh karena itu dalam pemecahan permasalahan ini kemacetan dalam pengembalian dana pinjaman UKM dapat dilihat secara jelas.

#### 4.9 ANALISIS VERIABEL X (PEMBINAAN TIM TEKNIS )

Variabel pembinaan tim teknis diukur melalui 4 (empat) sub variabel. Pada sub variabel melatih memiliki 3 (tiga) indikator, sub variabel memberikan kecakapan memiliki 2 (dua) indikator, sub.

Variabel memberikan petunjuk memiliki 2 (dua) indikator dan mengarahkan memiliki 1 (satu) indikator.

Pada variabel ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh tim teknis Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pengelola kelompok usaha. Untuk itu pada pembahasan ini akan dibahas masing-masing sub. variabel pembinaan, sebagai berikut :

#### 2.1.1. Pembinaan Melatih.

UNIVERSITAS TERBUKA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418  
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Pembinaan Tim Teknis Kabupaten dalam meningkatkan Kemampuan Pengelola Usaha Pengembalian Pinjaman UKM di Kecamatan Tebing.

Penyusun TAPM : **BABY SUSANTI**  
NIM : 014945175  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Hari / Tanggal : Sabtu / 6 September 2008

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

**Dr. DUDUNG BURHANUDIN, M.Pd.**  
NIP. 131 898 732

**Dr. LIESTYODO.B.I, M.Si.**  
NIP 131 568 783

Direktur Program Pascasarjana

**Prof. Dr. H. UDIN S.WINATAPUTRA, MA.**  
NIM. 130 367 151

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : BABY SUSANTI  
 NIM : 014945175  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Judul TAPM : Pembinaan Tim Teknis Kabupaten dalam meningkatkan Kemampuan Pengelola Usaha Pengembalian Pinjaman UKM di Kecamatan Tebing.

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister ( TAPM ) Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu / 6 September 2008  
 Waktu : 10.40 Wib s/d selesai.

Dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji : **Drs. Elfis Suanto, M.Si** .....

Penguji Ahli : **Dr. Irfan Ridwan Maksum** .....

Pembimbing I : **Dr. Liestyodono BI, M.Si** .....

Pembimbing II : **Dr. Dudung Burhanudin, M.Pd** .....

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418  
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN  
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BABY SUSANTI**  
NIM : 014945175  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul TAPM : Pembinaan Tim Teknis Kabupaten dalam meningkatkan Kemampuan Pengelola Usaha Pengembalian Pinjaman UKM di Kecamatan Tebing.

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada Direktur PPs-UT selaku Panitia Ujian Sidang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 09 September 2008

Mengetahui,  
Ketua Bidang ISIP

Mahasiswa

**Dra. SUSANTI, M.Si**  
NIP. 132 052 021

**BABY SUSANTI**  
NIM. 014945175

Direktur Program Pascasarjana

**Prof. Dr. H. UDIN S. WINATAPUTRA, MA.**  
NIM. 130 367 151

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418  
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Pembinaan Tim Teknis Kabupaten dalam meningkatkan Kemampuan Pengelola Usaha Pengembalian Pinjaman UKM di Kecamatan Tebing.

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan ( plagiat ), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjung Balai Karimun, September 2008

Yang Menyatakan,

**BABY SUSANTI**  
NIM. 014945175

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
PROPOSAL PENELITIAN**

Judul Penelitian : PEMBINAAN TIM TEKNIS KABUPATEN  
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN  
PENGELOLA USAHA PENGEMBALIAN  
PINJAMAN UKM DI KECAMATAN TEBING.

Penyusun TAPM : BABY SUSANTI

N I M : 014945175

Program Studi : Magister Administrasi Publik.

Hari / Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. DUDUNG BURHANUDIN, M.Pd  
NIP 131 898 732

Dr. LIESTYODO.B.I, M.Si  
NIP 131 568 783

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana

Dr. Suciati  
NIP 131 467 652